



**ANALISIS DETERMINAN TINGKAT PENGANGGURAN  
TERBUKA JAWA TIMUR TAHUN 2010-2015**

**SKRIPSI**

Oleh

**Devira Nuarisa Saleksafany  
NIM 140810101168**

**PROGRAM STUDI EKONOMI PEMBANGUNAN  
JURUSAN ILMU EKONOMI  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS  
UNIVERSITAS JEMBER  
2018**



**ANALISIS DETERMINAN TINGKAT PENGANGGURAN  
TERBUKA JAWA TIMUR TAHUN 2010-2015**

**SKRIPSI**

Diajukan guna melengkapi tugas akhir dan memenuhi salah satu syarat untuk menyelesaikan Program Studi Ekonomi Pembangunan (S1) dan memperoleh gelar Sarjana Ekonomi

Oleh

**Devira Nuarisa Saleksafany  
NIM 140810101168**

**PROGRAM STUDI EKONOMI PEMBANGUNAN  
JURUSAN ILMU EKONOMI  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS  
UNIVERSITAS JEMBER  
2018**

## PERSEMBAHAN

Dengan penuh rasa syukur yang sebesar-besarnya kepada Allah SWT, skripsi ini saya persembahkan untuk:

1. Ibunda Siti Aisyah dan Ayahanda Almarhum Ahmad Syanan tercinta atas segala dukungan baik dalam doa, kasih sayang, semangat, dan pengorbanan yang tak terhingga kepada penulis;
2. Guru-guru sekolahku sedari Sekolah Dasar hingga Perguruan Tinggi yang selalu memberikan sumbangsih ilmu dengan penuh kesabaran dan keikhlasan;
3. Almamater Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember.

## MOTTO

“Boleh jadi kamu membenci sesuatu, padahal ia amat baik bagi kamu. Dan boleh jadi kamu mencintai sesuatu, padahal ia amat buruk bagi kamu. Allah Maha mengetahui sedangkan kamu tidak mengetahui”

(Al-Baqarah: 216)\*)

atau

“Bermimpilah seakan kau hidup selamanya.  
Hiduplah seakan kau akan mati hari ini”

(James Dean)\*\*)

atau

“Someone is sitting in the shade today because someone planted a tree a long time ago.”

(Warren Buffet\*\*\*)

---

\* ) Departemen Agama Republik Indonesia. 1998. Al Qur'an dan Terjemahannya. Semarang: PT Kumudasmoro Graffindo.

\*\* ) Kutipan Buku *Knowledge Management: An Introduction*. Kevin C. Desouza. 2011 . Knowledge Management: An Introduction Jakarta: Gramedia.

\*\*\* ) Kutipan Buku *Warren Buffet: A Life of Inspiration*. Ryan Patterson,. 2017. Warren Buffet: A Life of Inspiration. Jakarta: Gramedia.

**PERNYATAAN**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

nama : Devira Nuarisa Saleksafany

NIM : 140810101168

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang berjudul: “Analisis Determinan Tingkat Pengangguran Terbuka Jawa Timur Tahun 2010-2015” adalah benar-benar hasil karya sendiri, kecuali jika dalam pengutipan substansi disebutkan sumbernya, dan belum pernah diajukan pada institusi manapun, serta bukan karya jiplakan. Saya bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, tanpa adanya tekanan dan paksaan dari pihak manapun serta bersedia mendapat sanksi akademik jika ternyata di kemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 3 September 2018

Yang menyatakan,

Devira Nuarisa Saleksafany

NIM 140810101168

**SKRIPSI**

**ANALISIS DETERMINAN TINGKAT PENGANGGURAN TERBUKA  
JAWA TIMUR TAHUN 2010-2015**

Oleh

Devira Nuarisa Saleksafany  
NIM 140810101168

Pembimbing

Dosen Pembimbing Utama : Dra. Nanik Istiyani, M.Si

Dosen Pembimbing Anggota : Dra. Riniati, MP

**TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI**

Judul Skripsi : Analisis Determinan Tingkat Pengangguran Terbuka Jawa Timur Tahun 2010-2015  
Nama Mahasiswa : Devira Nuarisa Saleksafany  
NIM : 1140810101168  
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis  
Jurusan : Ilmu Ekonomi  
Konsentrasi : Ekonomi Sumber Daya Manusia  
Tanggal Persetujuan : 30 November 2018

Pembimbing I

Pembimbing II

Dr. Nanik Istiyani M.Si  
NIP. 196101221987022002

Dra. Riniati, MP  
NIP. 196004301986032001

Mengetahui,  
Ketua Jurusan

Dr. Sebastiana Viphindrartin, M.Kes  
NIP. 196411081989022001

**PENGESAHAN**

Judul Skripsi

**ANALISIS DETERMINAN TINGKAT PENGANGGURAN TERBUKA  
JAWA TIMUR TAHUN 2010-2015**

Yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : Devira Nuarisa Saleksafany

NIM : 140810101168

Jurusan : Ilmu Ekonomi

telah dipertahankan di depan panitia penguji pada tanggal:

12 Oktober 2018

dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk diterima sebagai kelengkapan  
gunamemperoleh Gelar Sarjana Ekonomi pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis  
Universitas Jember.

Susunan Panitia Penguji

1. Ketua : Dr. I Wayan Subagiarta, M.Si (.....)  
NIP. 196004121987021001
2. Sekretaris : Dr. Endah Kurnia Lestari, S.E, M.E (.....)  
NIP.197804142001122003
3. Anggota : Dr. Lilis Yuliati, S.E., M.Si (.....)  
NIP.196907181995122001

Mengetahui/Menyetujui,  
Universitas Jember  
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis



Dr. Muhammad Miqdad, S.E., M.M., Ak.,CA  
NIP. 19710727199512101



*Analisis Determinan Tingkat Pengangguran Terbuka Jawa Timur  
Tahun 2010-2015*

**Devira Nuarisa Saleksafany**

Program Studi Ekonomi Pembangunan, Jurusan Ilmu Ekonomi, Fakultas Ekonomi  
dan Bisnis, Universitas Jember

**ABSTRAK**

Dalam pembangunan ekonomi negara-negara berkembang, pengangguran yang semakin bertambah jumlahnya merupakan masalah yang lebih rumit dan serius dari pada masalah perubahan dalam distribusi pendapatan yang kurang menguntungkan penduduk yang berpendapatan rendah. Masalah pengangguran ini juga dialami oleh Provinsi Jawa Timur yaitu jumlah pengangguran tertinggi terjadi pada tahun 2015 yaitu sebesar 4,47% dan jumlah pengangguran terendah terjadi di tahun 2012 sebesar 4,11%. Rata-rata jumlah Tingkat Pengangguran Terbuka di kota-kota besar Jawa Timur pada tahun 2015 mengalami kenaikan cukup signifikan seperti Surabaya, Kediri, Batu, Malang, Mojokerto, Sidoarjo dan Pasuruan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui seberapa besar pengaruh Jumlah Penduduk, Laju Pertumbuhan Ekonomi dan Upah Minimum Regional terhadap tingkat pengangguran terbuka di Provinsi Jawa Timur Tahun 2010-2015. Metode analisis yang digunakan adalah model regresi data panel. Hasil regresi data panel menunjukkan secara simultan bahwa variabel Jumlah Penduduk, Laju Pertumbuhan Ekonomi, dan Upah Minimum berpengaruh signifikan terhadap tingkat Pengangguran terbuka di Provinsi Jawa Timur Tahun 2010-2015. Hasil analisis uji parsial menunjukkan bahwa variabel jumlah penduduk dan laju pertumbuhan berpengaruh signifikan sedangkan variabel upah minimum regional mempunyai pengaruh yang tidak signifikan terhadap tingkat pengangguran terbuka di Provinsi Jawa Timur Tahun 2010-2015.

**Kata kunci** : Tingkat Pengangguran Terbuka, Jumlah Penduduk, Laju Pertumbuhan Penduduk, Upah Minimum Regional

*Determinants Analysis Of Open Unemployment Rate East Java 2010-2015*

**Devira Nuarisa Saleksafany**

*Department of Economics, Faculty of Economics and Business  
University of Jember*

**ABSTRACT**

*In the economic development of developing countries, the increasing number of unemployed are a more complicated and serious problem than the problem of changes in income distribution that is less profitable to the low income population. This unemployment problem was also experienced by East Java Province, namely the highest unemployment rate occurred in 2015, which was 4.47% and the lowest number of unemployment occurred in 2012 was 4.11%. The average number of Open unemployment Rate in the big cities of East Java in 2015 experienced a significant increase, such as Surabaya, Kediri, Batu, Malang, Mojokerto, Sidoarjo and Pasuruan. The aim of this research were to determine how much influence the Population Number, the Rate of Economic Growth and the Regional Minimum Wage on the open unemployment rate in East Java Province in 2010-2015. The analytical method used is the panel data regression model. Panel data regression results show simultaneously that the variable Population, Economic Growth Rate, and Minimum Wage have a significant effect on the level of open unemployment in East Java Province in 2010-2015. The results of the partial test analysis show that the variables of population and growth rates have a significant effect while the variable regional minimum wages have an insignificant influence on the open unemployment rate in East Java Province in 2010-2015.*

**Keywords:** *Open Unemployment Rate, Population Number, Population Growth Rate, Regional Minimum Wage*

## RINGKASAN

**Analisis Determinan Tingkat Pengangguran Terbuka Jawa Timur Tahun 2010-2015;** Devira Nuarisa Saleksafany ; 140810101168; 2018; Program Studi Ekonomi Pembangunan Jurusan Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember.

Indonesia merupakan salah satu negara berkembang, berdasarkan taraf kesejahteraan masyarakat dalam menghadapi pengangguran. Masalah pengangguran ini juga dialami oleh Provinsi Jawa Timur. Hal ini berkaitan dengan hasil sensus penduduk tahun 2010 yang mencatat 237,6 juta jiwa sebagai bukti pertumbuhan penduduk Indonesia 5 tahun lebih cepat dari proyeksi BPS. Karena proyeksi semula, tahun 2010 baru berjumlah 234,2 juta jiwa dan tahun 2015 berkisar 237,8 juta jiwa. Kenyataannya, tahun 2010 penduduk Indonesia sudah mencapai 237,6 juta jiwa. Meledaknya jumlah penduduk tersebut tersebar di wilayah Indonesia, khususnya di Pulau Jawa (yang berlokasi di bagian barat Indonesia dengan populasi padat). Dampak dari ledakan penduduk diantaranya bertambah tanggungan keluarga dan dibutuhkan lapangan pekerjaan yang lebih banyak sehingga adanya ketimpangan antara jumlah penduduk dengan tenaga kerja yang mengakibatkan jumlah pengangguran meningkat.

Jumlah pengangguran tertinggi terjadi pada tahun 2015 yaitu sebesar 4,47% dan jumlah pengangguran terendah terjadi di tahun 2012 sebesar 4,11%. Tercatat bahwa jumlah angkatan kerja Jawa Timur pada Agustus 2015 bertambah 125 ribu orang yaitu menjadi 20,27 juta dibanding dengan jumlah angkatan kerja pada tahun 2014. Peningkatan jumlah angkatan kerja 2015, mengakibatkan Tingkat Pengangguran Terbuka Jawa Timur pada Agustus 2015 mencapai 4,47% lebih tinggi dibanding tahun sebelumnya dimana hanya mencapai 4,19%. Tercatat bahwa TPT tertinggi di tahun 2015 adalah kota Kediri yaitu sebesar 8,12%. Rata-rata jumlah Tingkat Pengangguran Terbuka di kota-kota besar Jawa Timur pada tahun 2015 mengalami kenaikan cukup signifikan seperti Surabaya, Kediri, Batu, Malang, Mojokerto, Sidoarjo dan Pasuruan. Rata-rata TPT di kota-kota tersebut hampir sebesar 1,3% dibanding tahun 2014. Kondisi meningkatnya TPT Jawa

Timur tersebut diduga akibat dari *ASEAN Economic Community/AEC* pada awal tahun 2015.

Seiring dengan laju pertumbuhan ekonomi, tingkat pengangguran di Provinsi Jawa Timur cenderung menurun. Tingkat pengangguran terbuka Jawa Timur berkurang sebesar 0,22% selama tahun 2010-2015, menunjukkan pertumbuhan ekonomi yang relatif tinggi belum berhasil menekan tingkat pengangguran secara signifikan. Tingkat pengangguran Jawa Timur berada di bawah nasional, menunjukkan perluasan lapangan kerja terjadi pada sektor ekonomi.

Pertumbuhan ekonomi mempengaruhi tingkat pengangguran di suatu daerah. Semakin tinggi pertumbuhan ekonomi di suatu daerah maka akan semakin tinggi pula kesempatan berkembang bagi perusahaan dan penciptaan kesempatan kerja bagi masyarakat daerah tertentu. Disamping itu pertumbuhan ekonomi melalui PDRB yang meningkat, diharapkan dapat menyerap tenaga kerja di wilayah tersebut, karena kenaikan PDRB kemungkinan dapat meningkatkan kapasitas produksi. Hal tersebut mengindikasikan bahwa penurunan PDRB suatu daerah dapat dikaitkan dengan tingginya jumlah pengangguran pada daerah tersebut. Angka pengangguran yang rendah dapat mencerminkan pertumbuhan ekonomi yang baik.

Indikator selanjutnya yang berpengaruh terhadap tingkat pengangguran terbuka adalah besarnya Upah Minimum Regional (UMR). Upah merupakan kompensasi yang diterima oleh suatu unit tenaga kerja yang berupa sejumlah uang yang dibayarkan kepadanya. Penetapan tingkat upah yang ditetapkan pemerintah pada suatu wilayah akan berpengaruh pada tingkat pengangguran yang terjadi. Hal ini bisa saja terjadi karena dengan semakin tinggi besarnya upah yang ditetapkan oleh pemerintah maka hal tersebut akan berpengaruh pada peningkatan output yang harus dikeluarkan oleh suatu perusahaan. Akibatnya suatu perusahaan akan melakukan efisiensi terhadap produksi dengan cara mengurangi jumlah tenaga kerja, namun dengan turunnya tingkat upah akan diikuti oleh meningkatnya kesempatan kerja, sehingga dapat dikatakan bahwa kesempatan kerja mempunyai hubungan timbal balik dengan tingkat upah. Upah mempunyai pengaruh terhadap

jumlah angkatan kerja, jika semakin tinggi tingkat upah yang ditetapkan maka berpengaruh pada meningkatnya biaya produksi, akibatnya untuk melakukan efisiensi perusahaan terpaksa melakukan pengurangan tenaga kerja, dan berakibat pada tingginya tingkat pengangguran (Dharmayanti,2011).

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui seberapa besar pengaruh Jumlah Penduduk, Laju Pertumbuhan Ekonomi dan Upah Minimum Regional terhadap tingkat pengangguran terbuka di Provinsi Jawa Timur Tahun 2010-2015. Untuk mengetahui tujuan penelitian ini, maka metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah model regresi data panel. Berdasarkan hasil dan pembahasan yang telah peneliti jelaskan maka dapat disimpulkan bahwa jumlah penduduk usia kerja terhadap tingkat pengangguran terbuka di Provinsi Jawa Timur tahun 2010-2015 menunjukkan hubungan negatif dan signifikan, laju pertumbuhan ekonomi terhadap tingkat pengangguran terbuka di Provinsi Jawa Timur tahun 2010-2015 menunjukkan hubungan yang negatif signifikan, upah minimum regional terhadap tingkat pengangguran terbuka di Provinsi Jawa Timur tahun 2010-2015 menunjukkan hubungan yang negatif tidak signifikan.

Saran yang diberikan oleh peneliti adalah dengan memperlambat laju pertumbuhan penduduk (meminimalisirkan menikah pada usia dini) yang diharapkan dapat menekan laju pertumbuhan sisi angkatan kerja baru atau melancarkan sistem transmigrasi dengan mengalokasikan penduduk padat ke daerah yang jarang penduduk dengan difasilitasi sektor pertanian, perkebunan, atau peternakan oleh pemerintah.

Pemerintah memberikan bantuan wawasan, pengetahuan dan kemampuan jiwa kewirausahaan kepada Usaha Kecil dan Menengah (UKM) berupa bimbingan teknis dan manajemen memberikan bantuan modal, perluasan pasar. Serta pemberian fasilitas agar dapat tumbuh secara mandiri dan andal bersaing di bidangnya. Mendorong terbentuknya kelompok usaha bersama dan lingkungan usaha yang menunjang dan mendorong terwujudnya pengusaha kecil dan menengah yang mampu mengembangkan usaha, menguasai teknologi dan informasi pasar dan peningkatan pola kemitraan UKM dengan BUMN, BUMD,

BUMS dan pihak lainnya. Hal ini akan menyelesaikan masalah pembangunan yaitu salah satunya pengangguran

Dengan minimnya penghasilan dari perusahaan, khususnya perusahaan menengah kebawah yang masih banyak di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Timur yang tidak mampu untuk membayar pekerjanya sesuai dengan upah minimum regional. Untuk mengurangi dampak yang ditimbulkan dari kebijakan upah minimum regional Pegawai Dinas Sosial dan Tenaga Kerja juga melakukan suatu upaya negosiasi antara pengusaha dan pekerja, yang didalamnya akan dibuat kesepakatan antara perusahaan dan buruh berkenaan dengan pengupahan sehingga tidak ada yang merasa dirugikan, tidak jarang ada perusahaan yang meskipun tidak mampu membayar upah buruh sesuai upah minimum regional yang telah ada, untuk menyesuaikan pemberian upah sesuai dengan upah minimum regional dengan memberi uang tambahan yang berupa uang makan, uang jalan dll. Dengan diberikan upah tambahan tersebut maka upah yang diterima buruh setidaknya mendekati upah minimum regional yang diharapkan mampu memenuhi kebutuhan hidupnya.

## PRAKATA

Puji Syukur kehadiran Allah SWT atas segala rahmat dan karunia-Nya, sholawat serta salamsemoga tetap tercurah kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “*Determinan Tingkat Pengangguran Terbuka Jawa Timur Tahun 2010-2015*”. Skripsi ini disusun guna memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi Jurusan Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember.

Penyusunan skripsi ini tidak lepas dari bantuan berbagai pihak baik itu berupa motivasi, nasehat, saran maupun kritik yang membangun. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati, penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Dr. Nanik Istiyani, M.Si selaku dosen pembimbing I dan Dosen Pembimbing Akademik (DPA) yang bersedia meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan, saran, kritik dan pengarahan dengan penuh keikhlasan, ketulusan dan kesabaran dalam menyelesaikan skripsi ini;
2. Dr. Riniati, M.P selaku dosen pembimbing II yang bersedia meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan, saran, kritik dan pengarahan dengan penuh keikhlasan, ketulusan dan kesabaran dalam menyelesaikan skripsi ini;
3. Dr. Muhammad Miqdad, S.E., M.M., Ak.,CA. selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember;
4. Dr. Sebastiana Viphindaratin, M.Kes. selaku Ketua Jurusan Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan
5. Dosen dan Civitas Akademik Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember, terimakasih atas bimbingan dan pelayanannya selama penulis menjadi mahasiswa;
6. Ibunda Siti Aisah dan Almarhum Ayahanda Ahmad Syanan tercinta, terimakasih yang tak terhingga ananda ucapkan atas kasih sayang, kesabaran, pengorbanan, kerja keras, dukungan, doa, kepercayaan, serta pengertian yang ibunda dan ayahanda berikan selama ini.

7. Vieza Saestika Falsa Adila, dan Goldy Harith Ars-Syansah selaku kakak dan adik kandung penulis yang telah memberi dukungan, doa serta kasih sayang;
8. Indra Pustanto yang telah menemani, mendukung dan memberi selamat.
9. Sahabat-sahabat terbaik Triana Wulandari, Wardatul Luthfiyana, dan Hendra Hadiatullah yang selalu menemani dan memotivasi;
10. B-team Astri Novanita, Siska Tri Noer Aisyah, Kavita Dwi Restiyana, Rosifatul Aqliyah, Fantimatus Sofia, Esperansa Olivita, Andita Purnama, Milka Rosalina Boruregar, Muhamad Labib Rusdi, dan Hans Revlino Wijaya yang selalu mendukung dan memberi semangat;
11. Saudaraku Lestari Puteri Utami, Kharisma Dhea, Catur Lestari Rahmawati, Eko Sri Susanto, Sri Wijiantini, Saat Afandi, dan Aliftha Fajar Firdaus yang telah memberi dukungan dan bantuan;
12. Rekan-rekan seperjuangan penulis di Jurusan Ilmu Ekonomi angkatan 2014 Nurma Kamelia, Halimatus Putrya, Maruf Hanuraga, Razan Febri, Dea Magdalena, dan Gita Triya terimakasih atas bantuan serta motivasinya;
13. Teman-teman KKN 30 Desa Curah Takir Kecamatan Tempurejo Kabupaten Jember.
14. Semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan skripsi ini yang tidak dapat disebutkan satu persatu.

Akhir kata tidak ada sesuatu yang sempurna di dunia ini, penulis menyadari atas kekurangan dalam penyusunan skripsi. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun penulis harapkan bagi penyempurnaan tugas akhir ini. Akhirnya, penulis berharap semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat dan tambahan pengetahuan bagi penulisan karya tulis selanjutnya. Amin.

Jember, 3 September 2018

Penulis



**DAFTAR ISI**

	Halaman
<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	i
<b>HALAMAN SAMPUL</b> .....	ii
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN</b> .....	iii
<b>HALAMAN MOTTO</b> .....	iv
<b>HALAMAN PERNYATAAN</b> .....	v
<b>HALAMAN PEMBIMBING</b> .....	vi
<b>TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI</b> .....	vii
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....	viii
<b>ABSTRAK</b> .....	ix
<b>ABSTRACT</b> .....	x
<b>RINGKASAN</b> .....	xi
<b>PRAKATA</b> .....	xv
<b>DAFTAR ISI</b> .....	xvii
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	xx
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	xxi
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b> .....	xxii
<b>BAB 1. PENDAHULUAN</b> .....	1
<b>1.1 Latar Belakang</b> .....	1
<b>1.2 Rumusan Masalah</b> .....	6
<b>1.3 Tujuan Penelitian</b> .....	7
<b>1.4 Manfaat Penelitian</b> .....	7
<b>BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA</b> .....	8
<b>2.1 Landasan Teori</b> .....	8
2.1.1 Teori Pengangguran.....	8
2.1.2 Teori Kependudukan Malthus .....	9
2.1.3 Teori Pertumbuhan Ekonomi.....	10
2.1.4 Teori Upah A.W. Philips .....	11
2.1.5 Konsep Tenaga Kerja.....	12

2.1.6 Konsep Pengangguran .....	14
2.1.7 Konsep Pertumbuhan Ekonomi .....	18
2.1.8 Konsep Upah.....	21
2.1.9 Hubungan Jumlah Penduduk Usia Kerja Terhadap Tingkat Pengangguran Terbuka.....	25
2.1.10 Hubungan Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Tingkat Pengangguran Terbuka .....	25
2.1.11 Hubungan Upah Minimum Regional Terhadap Tingkat Pengangguran Terbuka.....	26
<b>2.2 Hasil Penelitian Terdahulu.....</b>	<b>27</b>
<b>2.3 Kerangka Konseptual.....</b>	<b>35</b>
<b>2.3 Hipotesis Penelitian.....</b>	<b>37</b>
<b>BAB 3. METODE PENELITIAN .....</b>	<b>38</b>
<b>3.1 Rancangan Penelitian .....</b>	<b>38</b>
3.1.1 Jenis Penelitian .....	38
3.1.2 Unit Analisis .....	38
3.1.3 Waktu dan Tempat Penelitian.....	38
3.1.4 Jenis dan Sumber Data.....	39
<b>3.2 Metode Analisis Data.....</b>	<b>39</b>
3.2.1 Analisis Panel Data.....	39
3.2.2 Uji Spesifikasi Model .....	42
3.2.3 Uji Statistik .....	43
3.2.4 Uji Asumsi Klasik.....	46
<b>3.3 Definisi Variabel Operasional.....</b>	<b>47</b>
<b>BAB 4. HASIL DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>48</b>
<b>4.1 Gambaran Umum .....</b>	<b>48</b>
4.1.1 Kondisi Geografis dan Administratif Jawa Timur.....	48
4.1.2 Kondisi Perekonomian Jawa Timur.....	49
4.1.3 Kondisi Jumlah Penduduk dan Ketenagakerjaan di Jawa Timur .....	50

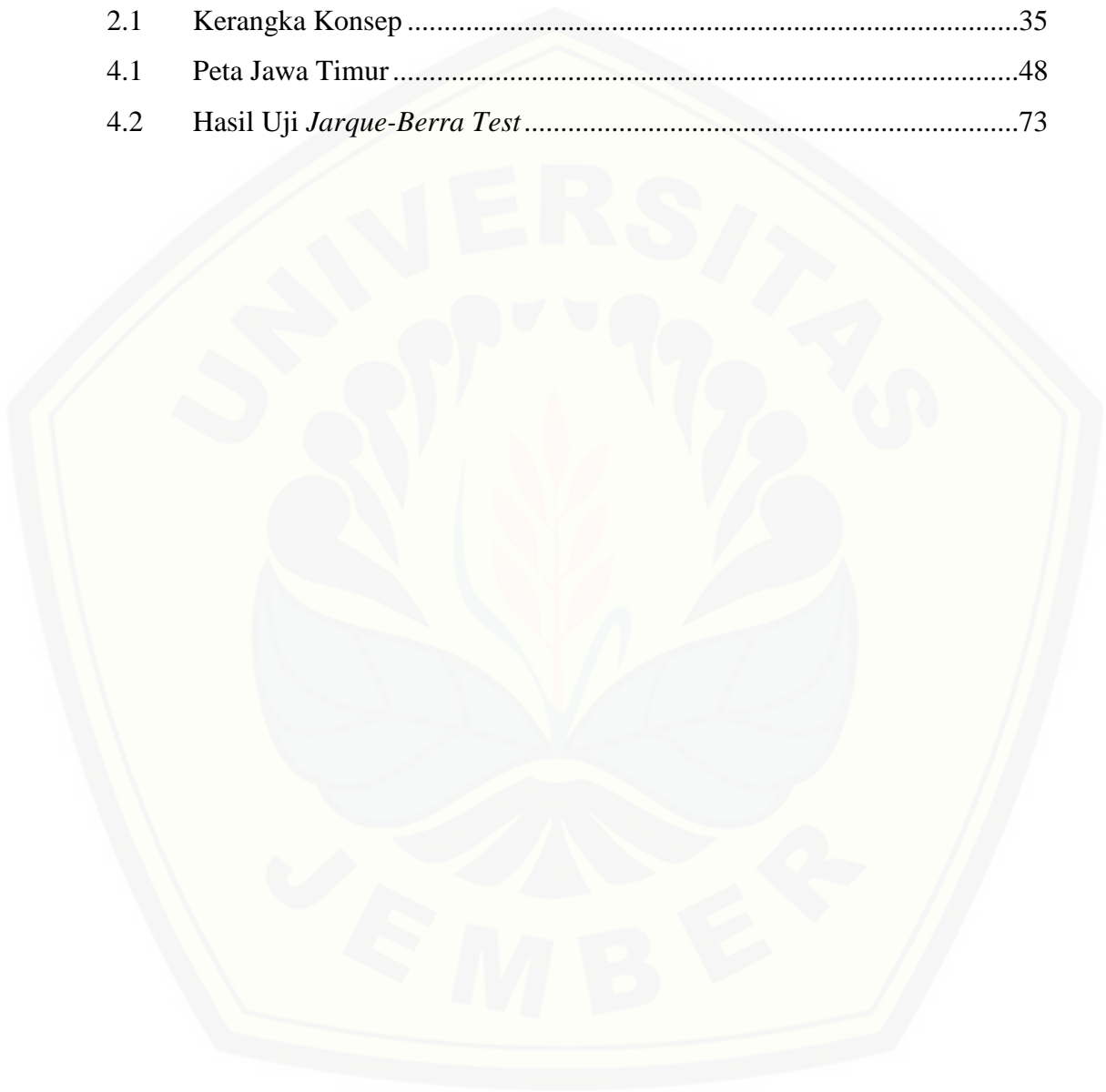
<b>4.2 Gambaran Variabel Penelitian</b> .....	53
4.2.1 Kondisi Tingkat Pengangguran Terbuka di Jawa Timur .....	53
4.2.2 Kondisi Jumlah Penduduk Usia Kerja di Jawa Timur .....	56
4.2.3 Kondisi Laju Pertumbuhan di Jawa Timur .....	58
4.2.4 Tingkat Upah Minimum Regional di Jawa Timur.....	61
<b>4.3 Hasil Penelitian</b> .....	63
4.3.1 Pemilihan Model Estimasi Data Panel.....	63
4.3.2 Analisis Regresi Data Panel.....	64
4.3.3 Uji Statistik .....	68
4.3.4 Uji Asumsi Klasik.....	71
<b>4.4 Pembahasan</b> .....	75
4.4.1 Pengaruh Jumlah Penduduk Usia Kerja terhadap Pengangguran Terbuka .....	78
4.4.2 Pengaruh Laju Pertumbuhan Ekonomi terhadap Tingkat Pengangguran Terbuka .....	79
4.4.3 Pengaruh Laju Upah Minimum Regional terhadap Tingkat Penganggura Terbuka.....	80
<b>BAB 5. KESIMPULAN DAN SARAN</b> .....	82
<b>5.1 Kesimpulan</b> .....	82
<b>5.2 Saran</b> .....	82
<b>DAFTAR PUSTAKA</b> .....	84
<b>LAMPIRAN</b> .....	87

**DAFTAR TABEL**

	Halaman
1.1 TPT di Jawa Timur dan TPT Indonesia 2010-2015 .....	3
2.1 Ringkasan Penelitian Terdahulu.....	32
4.1 Laju Pertumbuhan Ekonomi di Jawa Timur dan Indonesia Tahun 2010-2015 (Persen) .....	50
4.2 Jumlah Penduduk dan Ketenagakerjaan di Provinsi Jawa Timur .....	51
4.3 Perkembangan UMKM Provinsi Jawa Timur Tahun 2012-2015 .....	53
4.4 Tingkat Pengangguran Terbuka di Jawa Timur Tahun 2010-2015 (Persen).....	54
4.5 Jumlah Penduduk Usia Kerja di Jawa Timur Tahun 2010-2015 (jiwa) .....	57
4.6 Laju Pertumbuhan Ekonomi di Jawa Timur Tahun 2010-2015 (Persen).....	59
4.7 Tingkat Upah Minimum di Provinsi Jawa Timur Tahun 2010-2015..... (rupiah) .....	61
4.8 Hasil Uji Chow .....	63
4.9 Hasil Uji Hausman .....	64
4.10 Hasil Analisis Regresi Data Panel Dengan Pendekatan <i>Fixed Effect</i> .....	65
4.11 Hasil Estimasi <i>Cross-Section Fixed Effect Model</i> .....	67
4.12 Hasil Uji F .....	69
4.13 Hasil Uji t .....	70
4.14 Hasil Koefisien Determinasi .....	71
4.15 Hasil Uji Multikolinieritas .....	72
4.16 Hasil Heteroskedastisitas .....	73
4.17 Uji Durbin-Watson .....	73

**DAFTAR GAMBAR**

	Halaman
2.1 Kerangka Konsep .....	35
4.1 Peta Jawa Timur .....	48
4.2 Hasil Uji <i>Jarque-Berra Test</i> .....	73



DAFTAR LAMPIRAN

	Halaman
Lampiran A: Data Tingkat Pengangguran Terbuka (Y), Jumlah Penduduk, Usia Kerja (X1), Laju Pertumbuhan Ekonomi (X2) dan Upah Minimum (X3).....	87
Lampiran B: Uji Chow.....	93
Lampiran C: Uji Hausman.....	94
Lampiran D: Estimasi <i>Fixed Effect</i> .....	95
Lampiran E: Hasil Estimasi <i>Cross-section Fixed Effect</i> .....	96
Lampiran F: Uji Normalitas.....	97
Lampiran G: Uji Multikolinieritas.....	97
Lampiran H: Uji Autokorelasi.....	98
Lampiran I : Uji Heteroskedastisitas.....	99

## BAB 1. PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator yang amat penting dalam menilai kinerja suatu perekonomian, terutama untuk melakukan analisis tentang hasil pembangunan ekonomi yang telah dilaksanakan suatu negara atau suatu daerah. Ekonomi dikatakan mengalami pertumbuhan apabila produksi barang dan jasa meningkat dari tahun sebelumnya. Pertumbuhan ekonomi menunjukkan sejauh mana aktivitas perekonomian dapat menghasilkan tambahan pendapatan atau kesejahteraan masyarakat pada periode tertentu. Pertumbuhan ekonomi suatu negara atau suatu wilayah yang terus menunjukkan peningkatan menggambarkan bahwa perekonomian negara atau wilayah tersebut berkembang dengan baik (Amir, 2007).

Pembangunan ekonomi merupakan salah satu hal yang menarik karena di dalamnya terdapat banyak dinamika, baik secara mikro maupun secara makro. Pembangunan selalu menimbulkan dampak positif maupun dampak negatif, oleh karena itu diperlukan indikator sebagai tolak ukur terjadinya pembangunan. Suatu negara akan dikatakan sukses dalam pembangunan ekonomi jika telah menyelesaikan tiga masalah dalam pembangunan. Pertama, jumlah kemiskinan yang terus meningkat, kedua, distribusi pendapatan yang semakin memburuk, ketiga, lapangan pekerjaan yang kurang variatif sehingga tidak mampu menyerap para pencari kerja (Kuncoro, 2010:21).

Pembangunan ekonomi sebuah negara dapat dilihat dari beberapa indikator perekonomian, salah satu di antaranya adalah tingkat pengangguran. Berdasarkan tingkat pengangguran dapat dilihat kondisi suatu negara, apakah perekonomiannya berkembang atau lambat dan atau bahkan mengalami kemunduran. Selain itu dengan tingkat pengangguran, dapat dilihat pula ketimpangan atau kesenjangan distribusi pendapatan yang diterima suatu masyarakat negara tersebut. Pengangguran dapat terjadi sebagai akibat dari

tingginya tingkat perubahan angkatan kerja yang tidak diimbangi dengan adanya lapangan pekerjaan yang cukup luas serta penyerapan tenaga kerja yang cenderung kecil persentasenya, Hal ini disebabkan rendahnya tingkat pertumbuhan penciptaan lapangan kerja untuk menampung tenaga kerja yang siap bekerja.

Pembangunan ekonomi juga dapat diartikan sebagai suatu proses kenaikan pendapatan total dan pendapatan perkapita yang memperhitungkan adanya penambahan penduduk disertai perubahan fundamental dalam struktur ekonomi suatu negara. Pembangunan ekonomi tidak dapat lepas dari pertumbuhan ekonomi, dimana pembangunan ekonomi mendorong pertumbuhan ekonomi, dan sebaliknya pertumbuhan ekonomi memperlancar proses pembangunan ekonomi. Dalam konteks ekonomi, pembangunan sendiri dapat diartikan sebagai upaya yang dilakukan untuk meningkatkan pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB) di tingkat nasional atau Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) di tingkat daerah.

Indonesia merupakan salah satu negara berkembang, berdasarkan taraf kesejahteraan masyarakat dalam menghadapi pengangguran. Pengangguran merupakan masalah yang sangat kompleks karena mempengaruhi sekaligus dipengaruhi oleh beberapa faktor yang saling berinteraksi mengikuti pola yang tidak selalu mudah dipahami. Apabila pengangguran tersebut tidak segera diatasi maka dapat menimbulkan kerawanan sosial dan berpotensi mengakibatkan kemiskinan (BPS, 2007).

Masalah pengangguran ini juga dialami oleh Provinsi Jawa Timur. Hal ini berkaitan dengan hasil sensus penduduk tahun 2010 yang mencatat 237,6 juta jiwa sebagai bukti pertumbuhan penduduk Indonesia 5 tahun lebih cepat dari proyeksi BPS. Karena proyeksi semula, tahun 2010 baru berjumlah 234,2 juta jiwa dan tahun 2015 berkisar 237,8 juta jiwa. Kenyataannya, tahun 2010 penduduk Indonesia sudah mencapai 237,6 juta jiwa. Meledaknya jumlah penduduk tersebut tersebar di wilayah Indonesia, khususnya di Pulau Jawa (yang berlokasi di bagian barat Indonesia dengan populasi padat). Dampak dari ledakan penduduk diantaranya bertambah tanggungan keluarga dan dibutuhkan lapangan pekerjaan



yang lebih banyak sehingga adanya ketimpangan antara jumlah penduduk dengan tenaga kerja yang mengakibatkan jumlah pengangguran meningkat.

Sebenarnya pemerintah juga memikirkan dan menyediakan cara atau program untuk mengurangi pengangguran dengan cara meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi atau Produk Domestik Bruto (PDRB). Hasilnya tingkat pengangguran di Jawa Timur mengalami fluktuasi dari tahun ke tahunnya dan kecenderungan menurun meskipun di Tahun 2013 mengalami kenaikan sedikit. Jika melakukan perbandingan antara Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Indonesia dengan TPT Provinsi Jawa Timur termasuk rendah. Jumlah pengangguran terbuka di Provinsi Jawa Timur pada tahun 2013 mencapai 804.400 jiwa dengan presentase Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) sebesar 4,30% lebih rendah dibandingkan terhadap TPT Indonesia. Namun demikian rendahnya tingkat pengangguran ditengah pendapatan perkapita yang rendah ini mengindikasikan rendahnya produktivitas pekerja di tingkat daerah, diharapkan angka TPT dapat menurun terus hingga mencapai 3%.

Tabel 1.1 TPT di Jawa Timur dan TPT Indonesia Tahun 2010-2015 (persen)

No	Tahun	TPT Jawa Timur	TPT Indonesia
1	2010	4,25	7,14
2	2011	4,16	6,56
3	2012	4,11	6,13
4	2013	4,30	6,17
5	2014	4,19	5,94
6	2015	4,47	6,18

Sumber: BPS, 2017

Jumlah pengangguran tertinggi terjadi pada tahun 2015 yaitu sebesar 4,47% dan jumlah pengangguran terendah terjadi di tahun 2012 sebesar 4,11%. Tercatat bahwa jumlah angkatan kerja Jawa Timur pada Agustus 2015 bertambah 125 ribu orang yaitu menjadi 20,27 juta dibanding dengan jumlah angkatan kerja pada tahun 2014. Peningkatan jumlah angkatan kerja 2015, mengakibatkan Tingkat Pengangguran Terbuka Jawa Timur pada Agustus 2015 mencapai 4,47% lebih tinggi dibanding tahun sebelumnya dimana hanya mencapai 4,19%. Tercatat bahwa TPT tertinggi di tahun 2015 adalah kota Kediri yaitu sebesar 8,12%. Rata-

rata jumlah Tingkat Pengangguran Terbuka di kota-kota besar Jawa Timur pada tahun 2015 mengalami kenaikan cukup signifikan seperti Surabaya, Kediri, Batu, Malang, Mojokerto, Sidoarjo dan Pasuruan. Rata-rata TPT di kota-kota tersebut hampir sebesar 1,3% dibanding tahun 2014. Kondisi meningkatnya TPT Jawa Timur tersebut diduga akibat dari *ASEAN Economic Community/AEC* pada awal tahun 2015.

Seperti yang kita ketahui jika para tenaga kerja atau investor-investor asing masuk di Indonesia hal tersebut akan menimbulkan ketidak seimbangan grafik data jumlah pengangguran, yang diharapkan bukan terpenuhinya pekerjaan bagi para pengangguran, tapi lebih banyaknya jumlah pengangguran. Hal tersebut karena perusahaan-perusahaan, atau pabrik-pabrik milik orang asing atau investor pasti akan membawa peralatan-peralatan penunjang pekerjaan dari bangsa mereka yang sudah memenuhi standart dan canggih, hal tersebut akan berubah menjadi padat modal dari pada padat karya, karena pekerjaan-pekerjaan perusahaan dapat dilakukan oleh mesin-mesin tersebut.

Berbeda lagi halnya dengan jika tenaga kerja yang berasal dari Indonesia, akan berinisiatif untuk mencari pekerjaan di luar negeri hal tersebut karena di Indonesia sudah minim pekerjaan, dikarenakan pabrik-pabrik telah dominan menggunakan tenaga mesin, mereka akan mencari pekerjaan ke luar negeri, di situ dampak lain kan terjadi mengingat SDM di Indonesia masih sangat rendah karena minimnya pendidikan yang otomatis akan membuat para tenaga kerja asal Indonesia terkalahkan oleh tenaga kerja asing sebab kualitas dan kinerja yang terlampaui berbeda.

Seiring dengan laju pertumbuhan ekonomi, tingkat pengangguran di Provinsi Jawa Timur cenderung menurun. Tingkat pengangguran terbuka Jawa Timur berkurang sebesar 0,22% selama tahun 2010-2015, menunjukkan pertumbuhan ekonomi yang relatif tinggi belum berhasil menekan tingkat pengangguran secara signifikan. Tingkat pengangguran Jawa Timur berada di bawah nasional, menunjukkan perluasan lapangan kerja terjadi pada sektor ekonomi.

Dalam pembangunan ekonomi negara-negara berkembang, pengangguran yang semakin bertambah jumlahnya merupakan masalah yang lebih rumit dan lebih serius dari pada masalah perubahan dalam distribusi pendapatan yang kurang menguntungkan penduduk yang berpendapatan rendah. Keadaan di negara-negara berkembang dalam beberapa dasawarsa ini menunjukkan bahwa pembangunan yang telah tercipta tidak sanggup mengadakan kesempatan kerja yang lebih cepat dari pada penambahan penduduk yang berlaku. Oleh karenanya, masalah pengangguran yang mereka hadapi dari tahun ke tahun semakin lama semakin bertambah serius.

Pertumbuhan ekonomi mempengaruhi tingkat pengangguran di suatu daerah. Semakin tinggi pertumbuhan ekonomi di suatu daerah maka akan semakin tinggi pula kesempatan berkembang bagi perusahaan dan penciptaan kesempatan kerja bagi masyarakat daerah tertentu. Disamping itu pertumbuhan ekonomi melalui PDRB yang meningkat, diharapkan dapat menyerap tenaga kerja di wilayah tersebut, karena kenaikan PDRB kemungkinan dapat meningkatkan kapasitas produksi. Hal tersebut mengindikasikan bahwa penurunan PDRB suatu daerah dapat dikaitkan dengan tingginya jumlah pengangguran pada daerah tersebut. Angka pengangguran yang rendah dapat mencerminkan pertumbuhan ekonomi yang baik.

Indikator selanjutnya yang berpengaruh terhadap tingkat pengangguran terbuka adalah besarnya Upah Minimum Regional (UMR). Penetapan tingkat upah yang ditetapkan pemerintah pada suatu wilayah akan berpengaruh pada tingkat pengangguran yang terjadi. Hal ini bisa saja terjadi karena dengan semakin tinggi besarnya upah yang ditetapkan oleh pemerintah maka hal tersebut akan berpengaruh pada peningkatan output yang harus dikeluarkan oleh suatu perusahaan. Akibatnya suatu perusahaan akan melakukan efisiensi terhadap produksi dengan cara mengurangi jumlah tenaga kerja, namun dengan turunya tingkat upah akan diikuti oleh meningkatnya kesempatan kerja, sehingga dapat dikatakan bahwa kesempatan kerja mempunyai hubungan timbal balik dengan tingkat upah. Upah mempunyai pengaruh terhadap jumlah angkatan kerja, jika semakin tinggi tingkat upah yang ditetapkan maka berpengaruh pada

meningkatnya biaya produksi, akibatnya untuk melakukan efisiensi perusahaan terpaksa melakukan pengurangan tenaga kerja, dan berakibat pada tingginya tingkat pengangguran (Dharmayanti,2011)

Berdasarkan masalah di atas, diketahui bahwa tingkat pengangguran terbuka di Provinsi Jawa Timur masih tinggi. Penulis ingin melakukan penelitian dengan menggunakan faktor-faktor yang telah dijelaskan di atas antara lain jumlah penduduk usia kerja, pertumbuhan ekonomi, dan upah minimum regional. Usaha penelitian sudah banyak dilakukan secara mendalam dan mencakupi secara luas berbagai bidang kegiatan ekonomi dengan penelaahan serangkaian variabel dalam kaitannya dengan permasalahan pengangguran sehingga diperlukan suatu studi lebih lanjut dengan pengembangan-pengembangan model dan penyertaan variabel lain yang sesuai agar hasilnya lebih baik lagi. Berdasarkan latar belakang masalah di atas maka penulis akan mengambil judul “Analisis Determinan Pengangguran Terbuka di Provinsi Jawa Timur Tahun 2010-2015”.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Masalah pengangguran selalu menjadi persoalan yang perlu dipecahkan dalam perekonomian negara Indonesia. Jumlah penduduk yang semakin besar berdampak pada meningkatnya jumlah angkatan kerja yang berarti meningkatnya jumlah orang yang mencari pekerjaan dan bertambahnya jumlah tenaga kerja. Besar kecilnya tingkat pengangguran menentukan kondisi perekonomian di Indonesia, Jawa timur termasuk wilayah yang strategis penduduknya cukup besar.

Berdasarkan penjelasan tersebut, maka dapat dirumuskan masalah sebagai berikut :

1. Seberapa besar pengaruh jumlah penduduk usia kerja terhadap tingkat pengangguran terbuka di Provinsi Jawa Timur?
2. Seberapa besar pengaruh laju pertumbuhan ekonomi terhadap tingkat pengangguran terbuka di Provinsi Jawa Timur?
3. Seberapa besar pengaruh upah minimum regional terhadap tingkat pengangguran terbuka di Provinsi Jawa Timur?

### 1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah di atas maka tujuan yang akan dicapai pada penelitian ini yakni :

1. Untuk mengetahui besarnya pengaruh jumlah Penduduk Usia Kerja terhadap tingkat pengangguran terbuka di Provinsi Jawa Timur.
2. Untuk mengetahui besarnya pengaruh laju Pertumbuhan Ekonomi terhadap tingkat pengangguran terbuka di Provinsi Jawa Timur
3. Untuk mengetahui besarnya pengaruh Upah Minimum terhadap tingkat pengangguran terbuka di Provinsi Jawa Timur.

### 1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan pada penelitian ini yakni :

1. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan gambaran bagi pihak yang membutuhkan terutama bagi penelitian sejenis.
2. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pikiran kepada pemerintah Provinsi Jawa Timur dalam mengatasi permasalahan kependudukan.

## BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA

### 2.1 Landasan Teori

Secara umum teori diartikan sebagai serangkaian bagian, definisi atau dalil yang saling berhubungan dan menghadirkan sebuah pandangan sistematis tentang fenomena dengan menentukan hubungan antar variabel. Teori merupakan seperangkat proposisi yang menggambarkan suatu gejala yang terjadi. Untuk memudahkan penelitian diperlukan pedoman berfikir yaitu kerangka teori.

#### 2.1.1 Teori Pengangguran

Ada beberapa teori yang menjelaskan tentang Teori-Teori Pengangguran di Indonesia yaitu :

##### a. Teori Klasik

Teori Klasik menjelaskan pandangan bahwa pengangguran dapat dicegah melalui sisi penawaran dan mekanisme harga di pasar bebas supaya menjamin terciptanya permintaan yang akan menyerap semua penawaran. Menurut pandangan klasik, pengangguran terjadi karena mis-alokasi sumber daya yang bersifat sementara karena kemudian dapat diatasi dengan mekanisme harga

Jadi dalam Teori Klasik jika terjadi kelebihan penawaran tenaga kerja maka upah akan turun dan hal tersebut mengakibatkan produksi perusahaan menjadi turun. Sehingga permintaan tenaga kerja akan terus meningkat karena perusahaan mampu melakukan perluasan produksi akibat keuntungan yang diperoleh dari rendahnya biaya tadi. Peningkatan tenaga kerja selanjutnya mampu menyerap kelebihan tenaga kerja yang ada di pasar, apabila harga relatif stabil.

Ditinjau dari segi kebijakan ekonomi, pemerintah tidak perlu melakukan campur tangan atau intervensi apapun. Kalau terjadi resesi atau depresi (GDP menurun dan terjadi pengangguran) kita cukup menunggu saja sampai perekonomian tersebut melakukan proses penyesuaian, dan keadaan keseimbangan pasti akan kembali terjadi.

#### b. Teori Keynes

Dalam menanggapi masalah pengangguran Teori Keynes mengatakan hal yang berlawanan dengan Teori Klasik, menurut Teori Keynes sesungguhnya masalah pengangguran terjadi akibat permintaan agregat yang rendah. Sehingga terhambatnya pertumbuhan ekonomi bukan disebabkan oleh rendahnya produksi akan tetapi rendahnya konsumsi. Menurut Keynes, hal ini tidak dapat dilimpahkan ke mekanisme pasar bebas. Ketika tenaga kerja meningkat, upah akan turun hal ini akan merugikan bukan menguntungkan, karena penurunan upah berarti menurunkan daya beli masyarakat terhadap barang-barang. Akhirnya produsen akan mengalami kerugian dan tidak dapat menyerap tenaga kerja.

Peranan atau campur tangan pemerintah masih sangat diperlukan yaitu apabila perekonomian sepenuhnya diatur oleh kegiatan di pasar bebas, bukan saja perekonomian tidak selalu mencapai tingkat kesempatan kerja penuh tetapi juga kestabilan kegiatan ekonomi tidak dapat diwujudkan. Akan tetapi fluktuasi kegiatan ekonomi yang lebar dari satu periode ke periode lainnya dan ini akan menimbulkan implikasi yang serius kepada kesempatan kerja dan pengangguran dan tingkat harga. Keynes juga berpendapat bahwa dalam sistem pasar bebas penggunaan tenaga kerja penuh tidak selalu tercipta sehingga perlu dilakukan usaha dan kebijakan pemerintah untuk menciptakan penggunaan tenaga kerja penuh dan pertumbuhan ekonomi yang teguh (Sukirno, 2008:328-331).

Salah satu bentuk campur tangan yang dapat dilakukan adalah dengan menjalankan kebijakan fiskal. Dalam hal ini Keynes mengisyaratkan kebijakan fiskal yang ekspansif melalui pengurangan pajak dan penambahan pengeluaran pemerintah (*government expenditure*).

#### 2.1.2 Teori Kependudukan Malthus

Teori Malthus menjelaskan bahwa pertumbuhan penduduk cenderung melampaui pertumbuhan persediaan makanan. Dia mengatakan penduduk cenderung tumbuh secara “deret ukur” (misalnya, dalam lambang 1, 2, 4, 8, 16 dan seterusnya) sedangkan persediaan makanan cenderung tumbuh secara “deret

hitung” (misalnya, dalam deret 1,2 3, 4, 5, 6, 7, 8, dan seterusnya). Dalam karyanya yang terbit belakangan, Malthus menekankan lagi tesisnya, namun tidak sekaku semula, hanya saja dia berkata bahwa penduduk cenderung tumbuh secara tidak terbatas hingga mencapai batas persediaan makanan. Dari kedua uraian tersebut Malthus menyimpulkan bahwa kuantitas manusia akan terjerumus ke dalam kemiskinan kelaparan. Dalam jangka panjang tidak ada kemajuan teknologi yang mampu mengalihkan keadaan karena kenaikan supply makanan terbatas sedangkan “pertumbuhan penduduk tak terbatas, dan bumi tak mampu memproduksi makanan untuk menjaga kelangsungan hidup manusia”.

Apabila ditelaah lebih dalam toeri Malthus ini yang menyatakan penduduk cenderung bertumbuh secara tak terbatas hingga mencapai batas persediaan makanan, dalam hal ini menimbulkan manusia saling bersaing dalam menjamin kelangsungan hidupnya dengan cara mencari sumber makanan, dengan persaingan ini maka akan ada sebagian manusia yang tersisih serta tidak mampu lagi memperoleh bahan makanan. Pada masyarakat modern diartikan bahwa semakin pesatnya jumlah penduduk akan menghasilkan tenaga kerja yang semakin banyak pula, namun hal ini tidak diimbangi dengan kesempatan kerja yang ada. Karena jumlah kesempatan yang sedikit itulah maka manusia saling bersaing dalam memperoleh pekerjaan dan yang tersisih dalam persaingan tersebut menjadi golongan penganggur.

### 2.1.3 Teori Pertumbuhan Ekonomi

#### a. Adam Smith

Smith mengemukakan beberapa pandangan mengenai beberapa faktor yang penting peranannya dalam pertumbuhan ekonomi. Pandangannya yang pertama adalah peranan sistem pasar bebas, Smith berpendapat bahwa sistem mekanisme pasar akan mewujudkan kegiatan ekonomi yang efisien dan pertumbuhan ekonomi yang tangguh. Kedua perluasan pasar perusahaan-perusahaan melakukan kegiatan memproduksi dengan tujuan untuk menjualnya kepada masyarakat dan mencari untung. Ketiga spesialisasi dan kemajuan teknologi, perluasan pasar dan perluasan ekonomi yang digalakkannya, akan



memungkinkan dilakukan spesialisasi dalam kegiatan ekonomi. Seterusnya spesialisasi dan perluasan kegiatan ekonomi akan menggalakkan perkembangan teknologi dan produktivitas meningkat. Kenaikan produktivitas akan menaikkan pendapatan pekerja dan kenaikan ini akan memperluas pasaran.

b. Teori Malthus dan Ricardo

Tidak semua ahli ekonomi Klasik mempunyai pendapat yang positif mengenai prospek jangka panjang pertumbuhan ekonomi. Malthus dan Ricardo berpendapat bahwa proses pertumbuhan ekonomi pada akhirnya akan kembali ke tingkat subsisten. Jumlah penduduk atau tenaga kerja adalah berlebihan apabila dibandingkan dengan faktor produksi yang lain, penambahan penduduk akan menurunkan produksi per kapita dan taraf kemakmuran masyarakat. Maka, penambahan penduduk yang terus berlaku tanpa diikuti penambahan sumber-sumber daya yang lain akan menyebabkan kemakmuran masyarakat mundur kembali ke tingkat subsisten.

c. Teori Schumpeter

Pada permulaan abad ini berkembang pula suatu pemikiran baru mengenai sumber dari pertumbuhan ekonomi dan sebabnya konjungtur berlaku. Schumpeter menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi tidak akan terjadi secara terus menerus tetapi mengalami keadaan dimana adakalanya berkembang dan mengalami kemunduran. Konjungtur tersebut disebabkan oleh kegiatan para pengusaha (*entrepreneur*) melakukan inovasi atau pembaruan dalam kegiatan mereka menghasilkan barang dan jasa. Untuk mewujudkan inovasi yang seperti ini investasi akan dilakukan, dan penambahan investasi ini akan meningkatkan kegiatan ekonomi.

2.1.4 Teori Upah A.W. Phillips

A.W. Phillips menemukan hubungan antara tingkat perubahan upah dengan tingkat perubahan kesempatan kerja atau tingkat pengangguran. Phillips sendiri menyatakan bahwa semakin tinggi tingkat pengangguran semakin cepat kenaikan tingkat upah dan harga. Adanya tingkat inflasi yang tinggi akan mengakibatkan kenaikan pada tingkat upah.

A.W. Phillips menggambarkan bagaimana sebaran hubungan antara inflasi dengan tingkat pengangguran didasarkan pada asumsi bahwa inflasi merupakan cerminan dari adanya kenaikan permintaan agregat. Dengan naiknya permintaan agregat, maka sesuai dengan teori permintaan, jika permintaan naik maka harga akan naik. Dengan tingginya harga (inflasi) maka untuk memenuhi permintaan tersebut produsen meningkatkan kapasitas produksinya dengan menambah tenaga kerja (asumsinya tenaga kerja merupakan satu-satunya input yang dapat meningkatkan output). Akibat dari peningkatan permintaan tenaga kerja maka dengan naiknya harga-harga (inflasi), pengangguran berkurang .

#### 2.1.5 Konsep Tenaga Kerja

Pengertian umum mengenai tenaga kerja telah tercantum dalam Undang-Undang Pokok Ketenagakerjaan No. 13 Tahun 2003, yaitu setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan baik di dalam maupun diluar hubungan kerja guna menghasilkan jasa atau barang untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat.

Namun, ada beberapa penduduk yang mampu bekerja tetapi tidak mau bekerja. Mereka yang mau bekerja dinamakan angkatan kerja, mereka yang masih bersekolah, ibu rumah tangga, mempunyai pendapatan tanpa bekerja termasuk dalam kategori bukan angkatan kerja. Tenaga kerja terdiri dari angkatan kerja dan bukan angkatan kerja.

##### a. Angkatan kerja

Angkatan kerja adalah penduduk yang belum bekerja namun sudah siap bekerja atau sedang mencari pekerjaan. Angkatan kerja terdiri atas golongan yang bekerja dan golongan menganggur atau sedang mencari pekerjaan. Selain itu, angkatan kerja dapat diartikan sebagai bagian dari tenaga kerja yang terlibat dalam kegiatan produktif yaitu produksi barang dan jasa

b. Bukan Angkatan Kerja

Bukan angkatan kerja adalah penduduk dalam usia kerja yang tidak bekerja, tidak mempunyai pekerjaan dan sedang tidak mencari pekerjaan. Bukan angkatan kerja terdiri dari golongan yang bersekolah, golongan yang mengurus rumah tangga dan golongan lain-lain atau penerima pendapatan. Ketiga golongan dalam kelompok ini sewaktu-waktu dapat menawarkan jasanya untuk bekerja. Oleh sebab itu, kelompok ini sering juga dinamakan sebagai angkatan kerja potensial (potensial labor force).

Penduduk usia kerja menurut Badan Pusat Statistik (BPS, 2017) sesuai dengan yang disarankan oleh International Labor Organization (ILO) adalah penduduk usia 15 tahun keatas yang dikelompokkan ke dalam angkatan kerja dan bukan angkatan kerja. BPS membagi tenaga kerja (*Employed*) menjadi 3 macam, yaitu:

- 1) Tenaga kerja penuh (*Full Employed*), adalah tenaga kerja yang mempunyai jumlah jam kerja > 35 jam dalam seminggu dengan hasil kerja tertentu sesuai dengan uraian tugas.
- 2) Tenaga kerja tidak penuh atau setengah pengangguran (*Under Employed*), adalah tenaga kerja dengan jam kerja < 35 jam seminggu.
- 3) Tenaga kerja yang belum bekerja atau sementara tidak bekerja (*Unemployed*), adalah tenaga kerja dengan jam kerja 0 > 1 jam per minggu.

Pada dasarnya tenaga kerja dibagi ke dalam kelompok angkatan kerja (*labor force*) dan bukan angkatan kerja. Yang termasuk dalam angkatan kerja adalah golongan yang bekerja dan golongan yang menganggur dan mencari pekerjaan. BPS (2017) menyimpulkan tenaga kerja terdiri dari :

- a) Penduduk adalah semua orang yang berdomisili di wilayah geografis Republik Indonesia selama 6 bulan atau lebih dan atau mereka yang berdomisili kurang dari 6 bulan tetapi bertujuan untuk menetap.
- b) Umur seseorang dapat dilihat dari tanggal, bulan dan tahun dari waktu kelahiran responden menurut sistem kalender Masehi. Informasi ini

digunakan untuk mengetahui umur dari responden. Penghitungan umur harus selalu dibulatkan kebawah, atau disebut juga umur menurut ulang tahun yang terakhir. Apabila tanggal, bulan maupun tahun kelahiran seseorang tidak diketahui, pencacah dapat menghubungkan dengan kejadian-kejadian penting baik nasional maupun daerah.

- c) Penduduk usia kerja adalah penduduk berumur 15 sampai 65 tahun.
- d) Penduduk yang termasuk angkatan kerja adalah penduduk usia kerja (15 tahun dan lebih) yang bekerja, atau punya pekerjaan namun sementara tidak bekerja dan pengangguran.
- e) Penduduk yang termasuk bukan angkatan kerja adalah penduduk usia kerja (15 tahun dan lebih) yang masih sekolah, mengurus rumah tangga atau melaksanakan kegiatan lainnya selain kegiatan pribadi.
- f) Bekerja adalah kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh seseorang dengan maksud memperoleh atau membantu memperoleh pendapatan atau keuntungan, paling sedikit 1 jam (tidak terputus) dalam seminggu yang lalu. Kegiatan tersebut termasuk pola kegiatan pekerja tak dibayar yang membantu dalam suatu usaha/kegiatan ekonomi.
- g) Punya pekerjaan tetapi sementara tidak bekerja adalah keadaan dari seseorang yang mempunyai pekerjaan tetapi selama seminggu yang lalu sementara tidak bekerja karena berbagai sebab, seperti: sakit, cuti, menunggu panen, mogok dan sebagainya.
- h) Pengangguran Terbuka, ada beberapa macam pengangguran terbuka yaitu: penduduk yang sedang mencari pekerjaan, yang sedang mempersiapkan suatu usaha, penduduk yang merasa tidak mungkin mendapatkan pekerjaan, penduduk yang sudah punya pekerjaan tetapi belum memulai kerja.

#### 2.1.6 Konsep Pengangguran

Menurut Alghofari (2010) pengangguran adalah suatu keadaan di mana seseorang yang tergolong dalam angkatan kerja berusaha mencari pekerjaan tetapi

belum dapat memperolehnya. Seseorang yang tidak bekerja, tetapi belum dapat memperolehnya. Seseorang yang tidak bekerja, tetapi tidak secara aktif mencari pekerjaan tidak tergolong sebagai penganggur. Faktor utama yang menimbulkan pengangguran adalah kekurangan pengeluaran agregat.

Pengangguran diartikan sebagai seseorang yang tergolong dalam angkatan kerja dan secara aktif mencari pekerjaan pada suatu tingkat upah tertentu, tetapi tidak memperoleh pekerjaan diinginkan. Banyaknya pengangguran di suatu wilayah merupakan masalah yang tidak hanya mencakup bidang perekonomian saja. Di sisi lain, masalah pengangguran juga mempunyai hubungan erat dengan bidang sosial dan pendidikan. Di zaman seperti sekarang bukan hanya masyarakat yang memiliki pendidikan rendah saja yang menganggur, masyarakat yang memiliki tingkat pendidikan tinggi pula juga banyak yang menganggur (Sukirno, 2008:328-331).

$$\text{Tingkat Pengangguran} = \frac{\text{Jumlah pencari kerja}}{\text{Jumlah angkatan kerja}} \times 100\%$$

Berdasarkan penyebabnya pengangguran dapat dibagi menjadi empat kelompok (Sukirno, 2010:163-164) :

a. Pengangguran normal atau friksional

Apabila dalam suatu perekonomian terdapat pengangguran sebanyak dua atau tiga persen dari jumlah tenaga kerja maka perekonomian tersebut sudah dipandang sebagai kesempatan kerja penuh. Pengangguran sebanyak dua atau tiga persen tersebut dinamakan sebagai pengangguran normal atau pengangguran friksional. Para penganggur tersebut tidak memiliki pekerjaan bukan karena tidak memperoleh pekerjaan, tetapi karena sedang mencari pekerjaan lain yang lebih baik. Dalam perekonomian yang berkembang pesat, tingkat pengangguran cenderung rendah dan pekerjaan mudah diperoleh. Sebaliknya pengusaha susah memperoleh tenaga kerja, Akibatnya pengusaha menawarkan gaji yang lebih tinggi. Hal tersebut akan mendorong para pekerja untuk meninggalkan pekerjaan yang lama dan berpindah pada pekerjaan baru dengan penghasilan yang lebih tinggi atau yang lebih sesuai

dengan keahliannya. Dalam proses mencari pekerjaan baru tersebut, calon tenaga kerja dapat digolongkan sebagai penganggur, atau digolongkan sebagai pengangguran normal.

b. Pengangguran siklikal

Perekonomian tidak selalu berkembang dengan kokoh, adakalanya permintaan agregat lebih tinggi, yang mendorong pengusaha menaikkan tingkat produksinya. Lebih banyak pekerja baru digunakan dan pengangguran berkurang, akan tetapi pada masa lainnya permintaan agregat dapat menurun dengan tajam. Misalnya, penurunan komoditi pertanian yang disebabkan oleh menurunnya harga. Hal tersebut dapat menimbulkan dampak kepada perusahaan-perusahaan lain yang terkait, yang juga akan mengalami penurunan permintaan produksinya. Penurunan permintaan agregat mengakibatkan perusahaan-perusahaan mengurangi jumlah tenaga kerja atau perusahaan menutup usahanya, sehingga pengangguran akan meningkat. Pengangguran tersebut diistilahkan sebagai pengangguran siklikal.

c. Pengangguran struktural

Tidak semua industri dan perusahaan dalam perekonomian akan terus berkembang maju, tetapi sebagian akan mengalami kemunduran. Kemunduran tersebut ditimbulkan oleh salah satu atau beberapa faktor berikut: adanya produk baru yang lebih baik; kemajuan teknologi dapat mengurangi permintaan terhadap suatu barang; biaya pengeluaran yang sangat tinggi sehingga tidak mampu bersaing; dan ekspor produksi industri yang sangat menurun karena persaingan dengan negara-negara lain. Penurunan tersebut dapat menyebabkan kegiatan produksi dalam industri menurun, dan sebagian pekerja terpaksa diberhentikan dan menjadi penganggur. Pengangguran tersebut digolongkan sebagai pengangguran structural, karena disebabkan oleh perubahan struktur kegiatan ekonomi.

d. Pengangguran teknologi

Pengangguran dapat pula ditimbulkan oleh adanya penggantian tenaga manusia oleh mesin-mesin dan bahan kimia. Racun lalang dan rumput, misalnya, telah mengurangi penggunaan tenaga kerja untuk membersihkan

perkebunan, sawah dan lahan pertanian lain. Begitu juga mesin telah mengurangi kebutuhan tenaga kerja untuk membuat lubang, memotong rumput, membersihkan kawasan, dan memungut hasil. Di pabrik-pabrik, ada kalanya robot telah menggantikan tenaga kerja manusia. Pengangguran yang ditimbulkan oleh penggunaan mesin dan kemajuan teknologi dinamakan sebagai pengangguran teknologi.

Berdasarkan cirinya, Pengangguran dibagi ke dalam empat kelompok (Sukirno, 2010:163-164) :

1) Pengangguran terbuka

Pengangguran terbuka tercipta sebagai akibat penambahan lowongan pekerjaan yang lebih rendah dari penambahan tenaga kerja. Sebagai akibatnya dalam perekonomian semakin banyak jumlah tenaga kerja yang tidak dapat memperoleh pekerjaan. Efek dari kondisi tersebut dalam jangka panjang mereka tidak memperoleh pekerjaan. Jadi mereka menganggur secara nyata maupun separuh waktu. Pengangguran terbuka dapat pula terjadi sebagai akibat dari kegiatan ekonomi yang menurun, dari kemajuan teknologi yang mengurangi penggunaan tenaga kerja, atau sebagai akibat dari kemunduran industri.

2) Pengangguran tersembunyi

Pengangguran tersembunyi terutama terjadi pada sektor pertanian atau jasa. Setiap kegiatan ekonomi memerlukan tenaga kerja, dan jumlah tenaga kerja yang digunakan tergantung pada banyak faktor, antara lain: besar kecilnya perusahaan, jenis kegiatan perusahaan, mesin yang digunakan (padat karya atau padat modal) dan tingkat produksi yang dicapai. Di banyak negara berkembang didapati jumlah pekerja dalam kegiatan ekonomi lebih banyak dari yang diperlukan secara efisien. Kelebihan tenaga kerja yang digunakan digolongkan dalam pengangguran tersembunyi. Contohnya seperti anggota keluarga petani yang banyak namun mengerjakan lahan yang sempit.

### 3) Pengangguran Musiman

Pengangguran musiman terutama terdapat di sektor pertanian dan perikanan. Pada musim hujan penyadap karet dan nelayan tidak dapat melakukan pekerjaan dan terpaksa menganggur. Pada musim kemarau para petani tidak dapat mengerjakan tanahnya. Di samping itu pada umumnya para petani tidak begitu aktif di antara waktu sesudah menanam dan sesudah menuai. Apabila dalam masa tersebut para penyadap karet, nelayan dan petani tidak melakukan pekerjaan lain maka mereka terpaksa menganggur. Pengangguran tersebut digolongkan sebagai pengangguran musiman.

### 4) Setengah Menganggur

Pada negara-negara berkembang migrasi dari desa ke kota umumnya sangat pesat. Sebagai akibatnya tidak semua orang yang pindah ke kota dapat memperoleh pekerjaan dengan mudah. Sebagian terpaksa menjadi penganggur penuh waktu. Di samping itu ada pula yang tidak menganggur, tetapi tidak pula bekerja penuh waktu, dan jam kerja mereka jauh lebih rendah dari normal. Mereka mungkin hanya bekerja satu hingga dua hari seminggu, atau satu hingga empat jam sehari. Pekerja-pekerja demikian digolongkan sebagai setengah menganggur (*underemployed*), dan jenis penganggurannya disebut *underemployment*.

#### 2.1.7 Konsep Pertumbuhan Ekonomi

Menurut Sukirno (2008:328-331) pertumbuhan ekonomi berarti perkembangan kegiatan dalam perekonomian yang menyebabkan barang dan jasa yang diproduksi bertambah dan kemakmuran masyarakat meningkat. Untuk menentukan tingkat pertumbuhan ekonomi yang dicapai perlu dihitung pendapatan nasional riil, jadi pertumbuhan ekonomi mengukur prestasi dari perkembangan suatu perekonomian.

PDRB adalah nilai bersih barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh berbagai kegiatan ekonomi di suatu daerah dalam kurun waktu tertentu. PDRB dapat menggambarkan kemampuan suatu daerah dalam mengelola sumber daya alamyang dimilikinya. Oleh karena itu besaran PDRB yang dihasilkan oleh



masing-masing daerah sangat bergantung kepada potensi sumber daya alam dan faktor produksi daerah tersebut. Adanya keterbatasan dalam penyediaan faktor-faktor tersebut menyebabkan besaran PDRB bervariasi antar daerah. Di dalam perekonomian suatu negara, masing-masing sektor tergantung pada sektor yang lain, satu dengan yang lain saling memerlukan baik dalam tenaga, bahan mentah maupun hasil akhirnya. Sektor industri memerlukan bahan mentah dari sektor pertanian dan pertambangan, hasil sektor industri dibutuhkan oleh sektor pertanian dan jasa-jasa (Cholili, 2014). PDRB menurut harga konstan adalah merupakan ukuran kemakmuran ekonomi yang lebih baik, sebab perhitungan output barang dan jasa perekonomian yang dihasilkan tidak dipengaruhi oleh perubahan harga (Nainggolan, 2007).

PDRB menurut Badan Pusat Statistik (BPS) adalah jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha dalam suatu wilayah, atau merupakan jumlah seluruh nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan seluruh unit ekonomi di suatu wilayah. PDRB atas dasar harga berlaku menggambarkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga pada setiap tahun, sedangkan PDRB atas dasar harga konstan menunjukkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga pada tahun tertentu. PDRB atas dasar harga konstan digunakan untuk mengetahui pertumbuhan ekonomi dari tahun ke tahun (Sukirno, 2010), sedangkan menurut BPS Produk Domestik Regional Bruto atas dasar harga berlaku digunakan untuk menunjukkan besarnya struktur perekonomian dan peranan sektor ekonomi. Cara perhitungan PDRB dapat diperoleh melalui tiga pendekatan (Tarigan, 2008:7) yaitu:

a. Pendekatan Produksi

Pendekatan ini menghitung nilai tambah dari barang dan jasa yang diproduksi oleh suatu kegiatan ekonomi di daerah tersebut dikurangi biaya antar masing-masing total produksi bruto tiap kegiatan subsektor atau sektor dalam jangka waktu tertentu. Nilai tambah merupakan selisih antara nilai produksi dan nilai biaya antara yaitu bahan baku/penolong dari luar yang dipakai dalam proses produksi.

b. Pendekatan Pendapatan

Pendekatan ini nilai tambah dari setiap kegiatan ekonomi diperkirakan dengan menjumlahkan semua balas jasa yang diterima faktor produksi, yaitu upah, gaji, dan surplus usaha, penyusutan, pajak tidak langsung neto pada sektor pemerintah dan usaha yang sifatnya tidak mencari untung, surplus usaha tidak diperhitungkan. Surplus usaha meliputi bunga yang dibayarkan neto, sewa tanah, dan keuntungan.

c. Pendekatan Pengeluaran

Pendekatan ini menjumlahkan nilai penggunaan akhir dari barang dan jasa yang diproduksi di dalam negeri. Jika dilihat dari segi penggunaan maka total penyediaan/produksi barang dan jasa itu digunakan untuk konsumsi rumah tangga, konsumsi lembaga swasta yang tidak mencari untung, konsumsi pemerintah, pembentukan modal tetap bruto (investasi), perubahan stok, dan ekspor neto.

Menurut BPS, cara penyajian PDRB disusun dalam dua bentuk, yaitu :

1) PDRB atas dasar harga konstan

Jumlah nilai produksi atau pengeluaran atau pendapatan yang dihitung menurut harga tetap. Dengan cara meniai kembali atau mendefinisikan berdasarkan harga-harga pada tingkat dasar dengan menggunakan indeks harga konsumen. Dari perhitungan ini tercermin tingkat kegiatan ekonomi yang sebenarnya melalui PDRB riilnya.

2) PDRB atas dasar harga berlaku

Jumlah nilai tambah bruto yang timbul dari seluruh sektor perekonomian di suatu wilayah. Yang dimaksud nilai tambah yaitu nilai yang ditambahkan kepada barang dan jasa yang dipakai oleh unit produksi dalam proses produksi sebagai input antara. Nilai yang ditambahkan ini sama dengan balas jasa atas ikut sertanya faktor produksi dalam proses produksi.

### 2.1.8 Konsep Upah

Upah adalah pendapatan yang diterima tenaga kerja dalam bentuk uang, yang mencakup bukan hanya komponen upah/gaji, tetapi juga uang lembur dan tunjangan-tunjangan yang diterima secara rutin/reguler (tunjangan transport, uang makan dan tunjangan lainnya). Tidak termasuk sebagai upah adalah Tunjangan Hari Raya (THR), tunjangan bersifat tahunan, kwartalan, tunjangan-tunjangan lain yang bersifat tidak rutin dan tunjangan dalam bentuk natural (BPS, 2008).

Kebijakan upah minimum di Indonesia tertuang dalam Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor : Per-01/Men/1999 dan UU Ketenagakerjaan No.13 Tahun 2003. Upah minimum sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor : Per-01/Men/1999 tentang Upah Minimum adalah upah bulanan terendah yang terdiri dari upah pokok termasuk tunjangan tetap. Yang dimaksud dengan tunjangan tetap adalah suatu jumlah imbalan yang diterima pekerja secara tetap dan teratur pembayarannya, yang tidak dikaitkan dengan kehadiran maupun pencapaian prestasi tertentu. Tujuan dari penetapan upah minimum adalah untuk mewujudkan penghasilan yang layak bagi pekerja. Beberapa hal menjadi bahan pertimbangan termasuk meningkatkan kesejahteraan pekerja dan pertimbangan mengenai kondisi ekonomi secara umum.

Tujuan utama ditetapkannya upah minimum adalah memenuhi standar hidup minimum seperti untuk kesehatan, efisiensi, dan kesejahteraan pekerja. Upah minimum adalah usaha untuk mengangkat derajat penduduk berpendapatan rendah, terutama pekerja miskin. Peran pekerja/buruh, pengusaha, dan pemerintah sangat diperlukan dalam menyikapi dampak penetapan upah minimum. Dengan pengertian dan pemahaman serta kerjasama dari semua pihak yang terkait dengan hubungan industrial maka tujuan bersama dapat tercapai.

Upah mempunyai pengaruh yang cukup besar terhadap permintaan dan penawaran tenaga kerja, dan adanya perubahan upah akan mempengaruhi besar kecilnya penawaran tenaga kerja, sesuai dengan hukum penawaran bahwa tingkat upah yang tinggi akan menyebabkan meningkatnya jumlah tenaga kerja yang ditawarkan. Kemudian jika tingkat upah relatif rendah, maka jumlah tenaga kerja yang ditawarkan akan menjadi sedikit. Semakin rendah tingkat upah akan

mengakibatkan bertambahnya pengangguran yang terjadi akibat ketidakcocokan pekerja dengan tingkat upah yang berlaku.

Pemberian upah kepada tenaga kerja dalam suatu kegiatan produksi pada dasarnya merupakan imbalan/balas jasa dari para produsen kepada tenaga kerja atas prestasinya yang telah disumbangkan dalam kegiatan produksi. Upah yang diberikan oleh para pengusaha secara teoritis dianggap sebagai harga dari tenaga yang dikorbankan pekerja untuk kepentingan produksi.

Teori tentang pembentukan harga (pricing) dan pendayagunaan input (*employment*) disebut teori produktivitas marginal (*marginal productivity theory*, lazim juga disebut teori upah (*wage theory*). Produktivitas marginal tidak terpaku semata-mata pada sisi permintaan (*demand sale*) dari pasar tenaga kerja saja. Suatu perusahaan kompetitif yang membeli tenaga kerja di suatu pasar kompetitif sempurna akan menyerap tenaga kerja sampai ke suatu titik dimana tingkat upah sama dengan nilai produk marginal atau *Value Marginal Product* (VMP). Dengan demikian VMP merupakan kurva permintaan suatu perusahaan akan tenaga kerja.

Jenis-jenis upah dapat dibedakan menjadi :

a. Upah Nominal

Upah nominal ialah sejumlah uang yang dibayarkan kepada para buruh secara tunai sebagai imbalan atas jasa-jasanya sesuai ketentuan dalam Perjanjian Kerja. Upah nominal ini sering pula disebut sebagai upah uang (*money wages*).

b. Upah nyata

Upah nyata ialah upah uang yang benar-benar diterima oleh seseorang yang berhak. Upah nyata ditentukan oleh daya beli yang tergantung pada :

- 1). besar atau kecilnya jumlah uang yang diterima;
- 2). besar atau kecilnya biaya hidup yang diperlukan.

c. Upah Hidup

Kebutuhan hidup yang lebih luas, selain kebutuhan pokok yang dapat dipenuhi juga mencakup kebutuhan sosial seperti, pendidikan, bahan pangan, iuran asuransi jiwa dan lain-lain. Apabila perusahaan dapat berkembang dengan baik dan kuat tentu akan mampu meningkatkan upah hidup.

d. Upah Wajar

Upah wajar adalah uang imbalan atas jasa yang secara wajar diberikan oleh pengusaha kepada para buruh, sesuai dengan perjanjian kerja di antara mereka. Upah wajar sangat bervariasi dan bergerak dari Upah Minimum dan Upah Hidup, yang diperkirakan mampu mengatasi kebutuhan buruh dengan keluarganya.

Bagi Organisasi Buruh, upah mencerminkan berhasil atau tidaknya pencapaian salah satu tujuan dan merupakan salah satu faktor penting untuk mempertahankan adanya organisasi tersebut. Menurut Setiadi (2009) mengatakan sistem pembayaran upah adalah bagaimana cara perusahaan biasanya memberikan upah kepada pekerja/buruhnya. Ada beberapa macam sistem pembayaran upah :

1) Sistem Upah Jangka Waktu

Sistem upah jangka waktu adalah sistem pemberian upah menurut jangka waktu tertentu, misalnya harian, mingguan atau bulanan.

2) Sistem Upah Potongan

Sistem ini umumnya bertujuan untuk mengganti sistem upah jangka waktu jika hasilnya tidak memuaskan. Sistem upah ini hanya dapat diberikan jika hasil pekerjaannya dapat dinilai menurut ukuran tertentu, misalnya diukur dari banyaknya, beratnya, dan sebagainya.

3) Sistem Upah Permufakatan

Sistem upah permufakatan adalah suatu sistem pemberian upah dengan cara memberikan sejumlah upah pada kelompok tertentu. Selanjutnya, kelompok ini akan membagi-bagikan kepada para anggotanya.

4) Sistem Skala Upah Berubah

Jumlah upah yang diberikan berkaitan dengan penjualan hasil produksi di pasaran. Jika harga naik jumlah upahnya pun naik. Sebaliknya jika harga turun, upah pun akan turun. Itulah sebabnya disebut skala upah berubah.

5) Sistem Upah Indeks.

Sistem upah ini didasarkan atas indeks biaya kebutuhan hidup. Dengan sistem ini upah naik turun sesuai dengan naik turunnya biaya penghidupan meskipun tidak memengaruhi nilai nyata dari upah.

#### 6) Sistem Pembagian Keuntungan

Sistem upah ini dapat disamakan dengan pemberian bonus apabila perusahaan mendapat keuntungan di akhir tahun.

#### 2.1.9 Hubungan Jumlah Penduduk Usia Kerja Terhadap Tingkat Pengangguran Terbuka

Efek pertumbuhan penduduk usia kerja terhadap tingkat pengangguran dari pasar tenaga kerja yaitu, bahwa pertumbuhan penduduk mempunyai implikasi yang penting bagi kesempatan kerja. Menurut Algofari (2010) pertumbuhan penduduk yang cepat tanpa disertai dengan proporsi investasi yang lebih besar, menghalangi transformasi struktural dalam angkatan kerja.

Permintaan dan penawaran tenaga kerja merupakan jumlah usaha atau jasa kerja yang tersedia dalam masyarakat untuk menghasilkan barang dan jasa. Dalam definisi mengandung pengertian jumlah penduduk yang sedang dan siap untuk bekerja dan pengertian kualitas usaha kerja yang diberikan. Jumlah dan kualitas tenaga kerja tersebut dipengaruhi oleh banyak faktor seperti jumlah penduduk, struktur atau penduduk dalam usia kerja, tingkat partisipasi angkatan kerja, tingkat penghasilan, pendidikan, produktifitas dan sebagainya.

#### 2.1.10 Hubungan Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Tingkat Pengangguran Terbuka

Definisi pembangunan ekonomi menurut Jhon Stuart Mill, dalam Jingham (2012:496-497) menganggap pembangunan ekonomi sebagai fungsi dari tanah, tenaga kerja, dan modal. Sementara tanah dan tenaga kerja adalah dua faktor produksi yang asli, modal adalah persediaan yang dikumpulkan dari produk-produk tenaga kerja. Peningkatan kesejahteraan hanya mungkin bila tanah dan modal mampu meningkatkan produksi lebih cepat dibanding angkatan kerja. Kesejahteraan terdiri dari peralatan, mesin dan keterampilan angkatan kerja. Tenaga kerja produktif inilah yang merupakan pencipta kesejahteraan dan akumulasi modal.

Secara teori setiap adanya peningkatan dalam pertumbuhan ekonomi Indonesia diharapkan dapat menyerap tenaga kerja, sehingga dapat mengurangi jumlah pengangguran. Pertumbuhan ekonomi suatu wilayah di Indonesia dapat diukur melalui peningkatan atau penurunan PDRB yang dihasilkan suatu daerah, karena indikator yang berhubungan dengan jumlah pengangguran adalah PDRB. Berdasarkan beberapa penelitian terdahulu yang menjadi rujukan penelitian ini menunjukkan hasil yang berbeda, pengaruh PDRB dan jumlah pengangguran bersifat positif dan negative.

Pertumbuhan ekonomi melalui PDRB yang bersifat positif dikarenakan pertumbuhan ekonomi tidak dibarengi oleh peningkatan kapasitas produksi, sehingga pengangguran tetap meningkat seiring dengan pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi yang meningkat ini berorientasi pada padat modal, di mana kegiatan produksi untuk memacu output dan menghasilkan pendapatan yang meningkat lebih diutamakan ketimbang pertumbuhan ekonomi yang berorientasi pada padat karya.

Penelitian lain yang menyatakan pengaruh negatif antara PDRB terhadap jumlah pengangguran berpendapat bahwa pertumbuhan ekonomi yang meningkat di Indonesia memberikan peluang kerja baru ataupun memberikan kesempatan kerja dan berorientasi pada padat karya, sehingga pertumbuhan ekonomi mengurangi jumlah pengangguran.

#### 2.1.11 Hubungan Upah Minimum Regional Terhadap Tingkat Pengangguran Terbuka

Tenaga kerja yang menetapkan tingkat upah minimumnya pada tingkat upah tertentu, jika seluruh upah yang ditawarkan besarnya dibawah tingkat upah tersebut, seseorang pekerja akan menolak mendapatkan upah tersebut dan akibatnya menyebabkan pengangguran. Jika upah yang ditetapkan pada suatu daerah terlalu rendah, maka akan berakibat pada tingginya jumlah pengangguran yang terjadi pada daerah tersebut. Namun dari sisi pengusaha, jika upah meningkat dan biaya yang dikeluarkan cukup tinggi, maka akan mengurangi efisiensi pengeluaran, sehingga pengusaha akan mengambil kebijakan

pengurangan tenaga kerja guna mengurangi biaya produksi. Hal ini akan berakibat peningkatan pengangguran.

Menurut Alghofari (2010) menyatakan bahwa peningkatan upah menimbulkan dua efek yang bertentangan atas penawaran tenaga kerja. Pertama, efek substitusi yang mendorong tiap pekerja untuk bekerja lebih lama, karena upah yang diterimanya dari tiap jam kerja lebih tinggi. Kedua, Efek pendapatan mempengaruhi segi sebaliknya, yaitu tingginya upah menyebabkan pekerja ingin menikmati lebih banyak rekreasi bersamaan dengan lebih banyaknya komoditi dibeli.

## 2.2 Hasil Penelitian Terdahulu

Marhaeni (2013) dengan judul Analisis Beberapa Faktor yang Berpengaruh Terhadap Jumlah Pengangguran Kabupaten/Kota di Provinsi Bali , didapatkan hasil bahwa ada pengaruh pertumbuhan ekonomi terhadap jumlah pengangguran dimana pertumbuhan ekonomi berpengaruh positif dan signifikan terhadap jumlah pengangguran dengan hasil koefisien sebesar 0,571 pada sig. sebesar 0,000. UMK berpengaruh negatif dan signifikan terhadap jumlah pengangguran dengan koefisien -0,625 pada sig 0,024. Sedangkan Tingkat Pendidikan berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap jumlah pengangguran dengan koefisien sebesar -0,141 pada sig. 0,766.

Alghofari (2010) Analisis Tingkat Pengangguran di Indonesia Tahun 1980-2007 dengan hasil berdasarkan grafik dan data yang disajikan sebelumnya dapat diketahui bahwa jumlah penduduk yang bertambah tiap tahunnya ternyata memiliki hubungan searah dengan jumlah pengangguran. Dengan bertambahnya jumlah penduduk, mengakibatkan bertambahnya jumlah pengangguran. Hal ini juga didapat dari nilai koefisien korelasi sebesar 0.883251251 antara jumlah penduduk dan jumlah pengangguran. Data tersebut mengindikasikan hubungan positif dan kuat antara jumlah penduduk dan jumlah pengangguran. Berdasarkan nilai koefisien disimpulkan bahwa peningkatan jumlah penduduk seiring dengan peningkatan jumlah pengangguran di Indonesia. Penyebabnya adalah kurangnya



penyerapan tenaga kerja, sehingga hubungan antara kenaikan jumlah penduduk di Indonesia sangat kuat dengan kenaikan jumlah pengangguran.

Kedua, berdasarkan hasil deskripsi statistik secara grafik ditemukan bahwa hubungan antara inflasi dan pengangguran positif dan lemah. Ditinjau dari nilai koefisien korelasi sebesar 0.026707195 yang mengindikasikan lemahnya hubungan inflasi dan pengangguran. Inflasi yang naik ini tidak dapat dikaitkan dengan kenaikan jumlah pengangguran di Indonesia. Hal ini dikarenakan inflasi di Indonesia diukur melalui tujuh sektor perekonomian dan bukan kenaikan permintaan akibat kenaikan upah yang tinggi. Oleh karena itu, Analisis A.W. Phillips melalui kurva yang dikenal dengan kurva Phillips tidak sesuai dengan kondisi inflasi dan pengangguran di Indonesia. Dengan alasan inilah, maka tidaklah tepat bila perubahan jumlah pengangguran di Indonesia dihubungkan dengan inflasi.

Ketiga, berdasarkan hasil deskripsi statistik secara grafik dan data ditemukan bahwa besaran upah memiliki kecenderungan searah terhadap jumlah pengangguran di Indonesia tahun 1980-2007. Hal ini dapat dilihat dari nilai koefisien korelasi sebesar 0.940608 yang mengindikasikan hubungan kenaikan upah dengan kenaikan jumlah pengangguran bersifat positif dan kuat. Kenaikan besaran upah minimum rata-rata provinsi memiliki hubungan yang kuat dengan kenaikan pada jumlah pengangguran. Keempat, berdasarkan hasil deskripsi statistik melalui grafik dan data ditemukan bahwa pertumbuhan ekonomi belakangan ini mengalami pertumbuhan walaupun secara lambat. Hal tersebut diikuti dengan naiknya jumlah pengangguran. Nilai koefisien korelasi antara jumlah pengangguran dan pertumbuhan ekonomi sebesar 0.74466416 yang mengindikasikan hubungan positif dan cukup kuat. Kenaikan pertumbuhan ekonomi mempunyai hubungan yang kuat dengan bertambahnya jumlah pengangguran.

Senet dan Yuliarmi (2014) dengan judul Analisis Faktor yang Mempengaruhi Jumlah Pengangguran di Provinsi Bali. Berdasarkan hasil pengolahan dengan SPSS diketahui bahwa jumlah tingkat investasi memiliki t hitung sebesar 0,550 dan nilai sig 0,588. Angka tersebut menjelaskan tingkat

investasi memiliki pengaruh positif tidak signifikan terhadap jumlah pengangguran di Provinsi Bali bahwa sebagian investasi yang masuk ke Bali bermuatan padat modal. Pertumbuhan ekonomi mempunyai pengaruh negatif dan signifikan terhadap jumlah pengangguran di Provinsi Bali. Angka tersebut menjelaskan pertumbuhan ekonomi memiliki  $t$  hitung sebesar  $-2,257$  dan nilai sig.  $0,034$ . Pertumbuhan ekonomi yang semakin meningkat berarti produksi barang/jasa yang dihasilkan meningkat, dengan demikian diperlukan tenaga kerja semakin banyak untuk memproduksi barang/jasa sehingga pengangguran berkurang. Sedangkan Inflasi memiliki  $t$  hitung sebesar  $-1,792$  dan nilai sig.  $0,043$  yang berarti Inflasi berpengaruh negatif dan signifikan terhadap jumlah pengangguran di Provinsi Bali. Pertumbuhan Penduduk memiliki  $t$  hitung sebesar  $2,404$  dan nilai sig.  $0,025$  yang berarti bahwa pertumbuhan penduduk berpengaruh positif dan signifikan terhadap jumlah pengangguran di Provinsi Bali. Penyebab pengangguran dikarenakan tidak seimbangnya jumlah penduduk dengan lapangan pekerjaan yang tersedia. Pada dasarnya, peningkatan jumlah penduduk memiliki dua sisi yang berbeda. Di satu sisi jumlah penduduk yang besar merupakan modal pencapaian tujuan pembangunan, tetapi di sisi lain, dengan pengaturan yang tidak tepat, jumlah penduduk yang besar dapat menimbulkan masalah penduduk yang sangat krusial di bidang ketenagakerjaan.

Lindra (2014) dengan judul Analisis Pengaruh Tingkat Upah Minimum, Inflasi, dan Jumlah Penduduk Terhadap Pengangguran di Kota Malang (1996 – 2013). Dengan hasil Variabel tingkat upah minimum dan variabel pengangguran yang terjadi di Kota Malang berpengaruh negatif dan tidak signifikan. Hal ini bisa dikatakan bahwa ketika variabel tingkat upah minimum naik maka variabel pengangguran yang ada akan turun. Akan tetapi dalam penelitian ini terdapat pengaruh yang tidak signifikan antar kedua variabel tersebut. Parameter upah minimum yang ada tidak berpengaruh secara nyata terhadap permintaan akan tenaga kerja, karena pada umumnya upah bersifat kaku. Upah tidak langsung berubah ketika ada suatu perubahan melainkan akan direspon dalam jangka panjang. Yang kedua Variabel inflasi dan variabel pengangguran yang ada di Kota Malang berpengaruh positif dan signifikan. Hal ini berarti ketika variabel inflasi

naik maka variabel pengangguran juga akan naik. Untuk kasus di Kota Malang pada khususnya, kenaikan harga-harga atau inflasi pada umumnya disebabkan karena adanya kenaikan biaya produksi, bukan karena kenaikan permintaan. Dengan kenaikan biaya produksi inilah yang menyebabkan perusahaan akan mengurangi para pekerja yang ada, karena suatu perusahaan akan memilih memaksimalkan produksinya dengan jumlah pekerja yang sedikit dan dengan biaya produksi yang tinggi. Yang ketiga Variabel jumlah penduduk dan variabel pengangguran yang terjadi di Kota Malang berpengaruh negatif dan signifikan. Hal ini berarti ketika variabel jumlah penduduk tinggi maka variabel pengangguran akan turun. Hal ini terjadi karena pada kasus pengangguran yang terjadi di Kota Malang didominasi oleh pengangguran yang terdidik. Secara tidak langsung bahwa ketika jumlah penduduk tinggi dan diikuti dengan banyaknya pengangguran terdidik maka pengangguran akan terserap, karena dengan keadaan yang demikian maka akan mendorong setiap orang berlomba-lomba untuk mendapatkan pekerjaan.

Kurniawan (2013) dengan judul Analisis Pengaruh PDRB, UMK, dan Inflasi Terhadap Tingkat Pengangguran Terbuka di Kota Malang Tahun 1980-2011. Dengan hasil Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) mempunyai pengaruh negatif terhadap pengangguran terbuka. Hal ini mengindikasikan bahwa peningkatan pertumbuhan ekonomi atau Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) di Kota Malang sejalan dengan diikutinya penurunan pengangguran terbuka di Kota Malang, yang mana dapat dilihat dari data perkembangan antara PDRB dan data pengangguran terbuka Kota Malang tahun 1980-2011. Kedua, Upah Minimum Kota (UMK) yang mempunyai pengaruh yang positif terhadap pengangguran terbuka. Hal tersebut mengindikasikan apabila UMK meningkat maka jumlah pengangguran terbuka di Kota Malang akan naik begitu pula sebaliknya dan apabila masalah ini tidak dapat diselesaikan akan berdampak buruk pada jangka panjang. Ketiga, Inflasi mempunyai pengaruh negatif terhadap pengangguran terbuka. Hal ini mengindikasikan bahwa ketika inflasi di Kota Malang naik, maka pengangguran terbuka yang merupakan indikator ekonomi akan menurun.

Muslim (2014) dengan judul Pengangguran Terbuka dan Determinanya di Daerah Istimewah Yogyakarta tahun 2007-2012. Dengan hasil Laju pertumbuhan ekonomi, pendidikan, dan pengeluaran pemerintah berpengaruh negatif dan signifikan terhadap pengangguran terbuka. Sedangkan Angkatan Kerja berpengaruh positif dan signifikan terhadap pengangguran terbuka. Peningkatan angkatan kerja sebanyak 1%, maka tingkat pengangguran terbuka akan meningkat 4,14% di Daerah Istimewah Yogyakarta.

Sopianti (2013) dengan judul Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Tingkat Inflasi, dan Upah Minimum Terhadap Jumlah Pengangguran di Bali. Berdasarkan hasil uji F, dimana  $P\text{-Value} (0,00) < \alpha (0,05)$  berarti  $H_0$  di tolak. Hal ini menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi, tingkat inflasi, dan upah minimum secara serempak berpengaruh signifikan terhadap jumlah pengangguran. Variasi pengaruh dari ketiga variabel bebas dapat diketahui berdasarkan nilai  $R^2$  yang senilai 0,308. Jadi, 30,8% variasi jumlah pengangguran dipengaruhi oleh pertumbuhan ekonomi, tingkat inflasi, dan upah minimum, sedangkan sisanya sebesar 69,2% dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak dimasukkan ke dalam model. Hal dapat juga disebabkan oleh faktor - faktor lain yang mempengaruhi jumlah pengangguran misalnya lapangan pekerjaan yang belum sebanding dengan laju pertumbuhan penduduk yang setiap tahunnya terus meningkat, ataupun arah perekonomian Provinsi Bali yang erat dengan pariwisata sangat dipengaruhi oleh pihak luar yaitu jumlah wisatawan domestik maupun luar negeri.

Putro (2013) Dalam penelitian didapatkan hasil bahwa tingkat Pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDRB) berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat pengangguran yang terjadi di Kota Magelang. Pemanfaatan kondisi ekonomi daerah khususnya PDRB harus dilakukan secara optimal sehingga dapat menurunkan tingkat pengangguran yang ada.

Tingkat upah memiliki pengaruh Positif dan signifikan terhadap tingkat pengangguran Kota Magelang. Peningkatan upah disatu sisi sangat penting untuk meningkatkan kesejahteraan para pekerja tetapi di sisi lain peningkatan upah berdampak kepada naiknya biaya produksi yang harus dikeluarkan oleh pengusaha. Oleh karena itu Pemerintah harus mengeluarkan kebijakan yang

seimbang artinya tetap memperhatikan kesejahteraan pekerja tetapi tidak membebani para pengusaha, agar seimbang maka naiknya tingkat upah harus diimbangi dengan naiknya produktifitas sehingga pengusaha juga tidak terbebani dan tingkat pengangguran juga tidak meningkat. Pemerintah daerah dan serikat pekerja serta pengusaha harus selalu melakukan pertemuan guna mempertimbangkan nilai UMK. Hal ini diperlukan untuk menghindari meningkatnya jumlah pengangguran yang besar.

Tingkat inflasi yang terjadi di Kota Magelang memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat pengangguran yang terjadi di Kota Magelang. Kenaikan tingkat inflasi sebaiknya harus dikendalikan oleh pemerintah. Kebijakan dengan menambah lapangan pekerjaan juga bisa dilakukan untuk mengurangi tingkat pengangguran yang tinggi.

Dalam penelitian yang dilakukan didapatkan hasil bahwa tingkat Beban/Tanggungans Penduduk berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat pengangguran yang terjadi di Kota Magelang. Oleh karena itu dibutuhkan kebijakan untuk mengurangi jumlah penduduk di Kota Magelang sehingga beban/tanggungans yang di rasakan oleh penduduk usia produktif akan semakin berkurang, maka tingkat pengangguran di Kota Magelang akan berkurang.

Tabel 2.1 Ringkasan Penelitian Terdahulu

No	Nama dan Judul Peneliti	Variabel dan Alat Analisis	Hasil dan Kesimpulan
1	AAIN Marhaeni (2013) yang berjudul “Analisis Beberapa Faktor yang Berpengaruh Terhadap Jumlah Pengangguran Kabupaten/Kota di Provinsi Bali ”	Variabel dependen : Jumlah Pengangguran Variabel independen : Pertumbuhan Ekonomi,UMK, dan Tingkat Pendidikan  Alat Analisis : Ordinary Least Square (OLS) dengan persamaan regresi linear berganda	1. Pertumbuhan Ekonomi berpengaruh positif dan signifikan terhadap jumlah pengangguran 2. UMK berpengaruh negatif dan signifikan terhadap jumlah pengangguran 3. Tingkat Pendidikan berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap jumlah pengangguran
2	Farid Alghofari (2010) yang berjudul “Analisis Tingkat Pengangguran Di Indonesia Tahun 1980-2007”	Variabel dependen : Tingkat pengangguran Variabel independen: jumlah penduduk, tingkat inflasi, besaran upah, dan pertumbuhan ekonomi melalui PDB.  Alat Analisis: metode kuantitatif dengan studi yang diterapkan adalah metode analisis statistik deskriptif dan analisis korelasi	1. Jumlah penduduk, besaran upah, dan pertumbuhan ekonomi memiliki kecenderungan hubungan positif dan kuat terhadap jumlah pengangguran 2. Tingkat inflasi hubungannya positif dan lemah
3	Putu Dyah Rahadi Senet dan Ni Nyoman Yuliarmita (2014) yang berjudul Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Jumlah Pengangguran di Provinsi Bali	Variabel dependen : Jumlah pengangguran Variabel independen : Investasi, pertumbuhan ekonomi, inflasi, dan pertumbuhan penduduk  Alat analisis : SPSS dengan persamaan regresi linear berganda	1. Investasi berpengaruh positif dan tidak signifikan 2. Pertumbuhan ekonomi berpengaruh negatif dan signifikan 3. Inflasi berpengaruh negatif dan signifikan 4. Jumlah penduduk berpengaruh positif dan signifikan

No	Nama dan Judul Peneliti	Variabel dan Alat Analisis	Hasil dan Kesimpulan
4	Ayudha Lindra (2014) yang berjudul “Analisis Pengaruh Tingkat Upah Minimum, Inflasi, dan Jumlah Penduduk Terhadap Pengangguran di Kota Malang (1996 – 2013)”	Variabel Dependen: Pengangguran Variabel Independen : Tingkat Upah Minimum, Inflasi, dan Jumlah Penduduk Alat Analisis: Ordinary Least Square (OLS) dengan persamaan regresi linear berganda	1. UMK mempunyai pengaruh negatif yang tidak signifikan 2. Inflasi mempunyai pengaruh positif yang signifikan variabel jumlah penduduk mempunyai pengaruh negatif yang signifikan
5	Roby Cahyadi Kurniawan (2013) yang berjudul “Analisis Pengaruh PDRB, UMK, dan Inflasi Terhadap Tingkat Pengangguran Terbuka di Kota Malang Tahun 1980-2011”	Variabel Dependen: Pengangguran Terbuka Variabel Independen: PDRB, UMK, dan Inflasi Alat Analisis: Ordinary Least Square (OLS) dengan persamaan regresi linear berganda	1. PDRB memiliki pengaruh negatif yang signifikan 2. UMK memiliki pengaruh positif yang signifikan inflasi memiliki pengaruh negatif yang signifikan
6	Muhammad Rifqi Muslim (2014) yang berjudul “Pengangguran Terbuka dan Determinannya di Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2007-2012”	Variabel Dependen: Tingkat Pengangguran Terbuka. Variabel Independen: Laju pertumbuhan ekonomi, angkatan kerja, pendidikan dan pengeluaran pemerintah Alat Analisis: Ordinary Least Square (OLS) dengan persamaan regresi linear berganda	1. Laju pertumbuhan ekonomi berpengaruh negatif dan signifikan 2. Angkatan kerja memiliki pengaruh positif dan signifikan 3. Pendidikan memiliki pengaruh negatif dan signifikan 4. Pengeluaran Pemerintah memiliki pengaruh negatif dan signifikan.

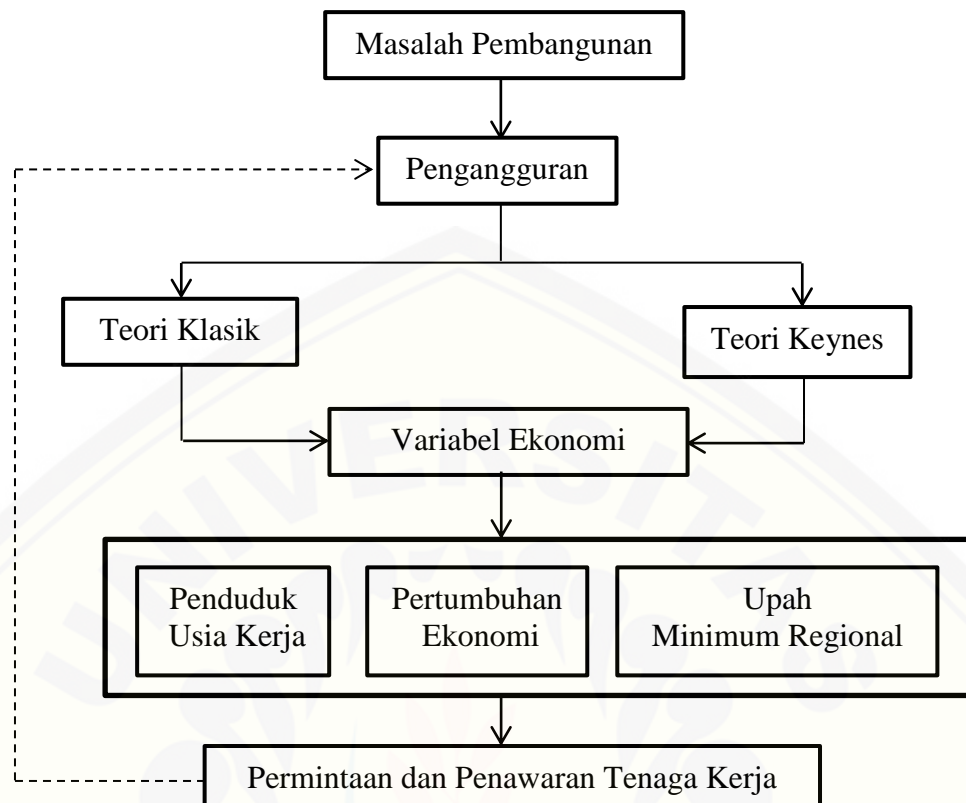
No	Nama dan Judul Peneliti	Variabel dan Alat Analisis	Hasil dan Kesimpulan
7	Ni Komang Sopianti (2013) yang berjudul “Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Tingkat Inflasi, dan Upah Minimum Terhadap Jumlah Pengangguran di Bali.	Variabel Dependen: Jumlah Pengangguran Variabel Independen : Pertumbuhan Ekonomi, Tingkat Inflasi, dan Upah Minimum, Alat Analisis: Ordinary Least Square (OLS) dengan persamaan regresi linear berganda	1. Pertumbuhan Ekonomi tidak berpengaruh terhadap jumlah pengangguran 2. Tingkat Inflasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap jumlah pengangguran 3. Upah Minimum berpengaruh positif dan signifikan terhadap jumlah pengangguran
8	Putro (2013) yang berjudul “ Analisis Pengaruh Produk Domestik Regional Bruto, Tingkat Upah Minimum Kota, Tingkat Inflasi Dan Beban / Tanggungan Penduduk Terhadap Pengangguran Terbuka Di Kota Magelang Periode Tahun 1990 – 2010.	Variabel Dependen: Pengangguran Terbuka Variabel Independen: PDRB, Infalsi , UMK, dan BTP Alat Analisis: SPSS dengan persamaan regresi linear berganda	1. PDRB memiliki pengaruh negatif terhadap pengangguran terbuka 2. Inflasi memiliki pengaruh positif terhadap pengangguran terbuka 3. UMK memiliki pengaruh positif terhadap pengangguran terbuka 4. BTP memiliki pengaruh positif terhadap pengangguran terbuka



### 2.3 Kerangka Konseptual

Berdasarkan kerangka konseptual peneliti mencoba menggambarkan konsep faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat pengangguran. Dalam hal ini menjelaskan Pembangunan ekonomi sebuah negara dapat dilihat dari beberapa indikator perekonomian, salah satu di antaranya adalah tingkat pengangguran. Provinsi Jawa Timur juga mengalami masalah pembangunan ekonomi seperti pengangguran tersebut. Dalam penelitian ini menggunakan 2 teori antara lain teori pengangguran klasik dan teori pengangguran Keynes. Terdapat 3 tiga variabel yang diteliti antara lain penduduk usia kerja, laju pertumbuhan ekonomi, dan upah minimum regional. Dengan penduduk usia kerja produktif meningkat, pertumbuhan ekonomi yang meningkat, dan upah minimum disetiap wilayah sesuai dengan kebutuhan hidup minimum akan mengakibatkan permintaan dan penawaran tenaga kerja di suatu wilayah. Dengan adanya permintaan tenaga kerja yang lebih banyak dari penawaran tenaga kerja maka akan mengurangi masalah pembangunan salah satunya seperti pengangguran.

Dari uraian penjelasan tersebut, maka dalam penelitian ini dibangun suatu alur pemikiran dalam hubungannya antara jumlah penduduk usia kerja, laju pertumbuhan ekonomi dan upah minimum regional di Provinsi Jawa Timur periode 2010-2015. Adapun bagan alur pemikiran yang dilandasi oleh kajian teoritis maupun penelitian-penelitian sebelumnya sebagai berikut :



Gambar 2.1 Kerangka Konsep

#### 2.4 Hipotesis Penelitian

Hipotesis adalah jawaban sementara yang kebenarannya masih perlu diuji setelah peneliti mendalami permasalahan penelitiannya dengan seksama serta menetapkan anggapan dasar (Arikunto, 2009:3). Dengan mengacu pada dasar pemikiran yang bersifat teoritis dan berdasarkan studi empiris yang pernah dilakukan berkaitan dengan penelitian dibidang ini, maka akan diajukan hipotesis sebagai berikut :

1. Jumlah penduduk usia kerja berpengaruh positif terhadap tingkat pengangguran terbuka di Provinsi Jawa Timur
2. Laju pertumbuhan ekonomi berpengaruh negatif terhadap tingkat pengangguran terbuka di Provinsi Jawa Timur
3. Upah minimum regional berpengaruh negatif terhadap tingkat pengangguran terbuka di Provinsi Jawa Timur

### **BAB 3. METODE PENELITIAN**

Pada bab 3 ini akan menjelaskan secara rinci terkait dengan rumusan masalah diatas yang menggunakan metode dan sumber data yang diperoleh, metode dan alat analisis data yang digunakan sebagai proses estimasi data dan digunakan untuk menjelaskan bahasa penelitian dengan menggunakan dua analisis, yaitu analisis deskriptif dan analisis kuantitatif.

#### **3.1 Rancangan Penelitian**

##### **3.1.1 Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif kuantitatif. Penelitian deskriptif yaitu penelitian yang dilakukan untuk mengetahui nilai variabel, baik satu variabel atau lebih (independen) tanpa membuat perbandingan, atau menghubungkan dengan variabel yang lain (Sugiyono, 2012:137). Penelitian ini akan menjelaskan hubungan antara jumlah penduduk usia kerja, laju pertumbuhan ekonomi, dan upah minimum regional terhadap tingkat pengangguran terbuka di Provinsi Jawa Timur.

##### **3.1.2 Unit Analisis**

Unit Analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah kinerja makro ekonomi. Indikator ekonomi makro wilayah dan kajian ini meliputi Tingkat Pengangguran Terbuka di Provinsi Jawa Timur sebagai variabel terikat (dependent variable), sedangkan jumlah penduduk usia kerja, laju pertumbuhan ekonomi, dan upah minimum regional sebagai variabel bebas (independent variable) yang terdiri dari 38 kabupaten/kota selama kurun waktu 2010-2015.

##### **3.1.3 Waktu dan Tempat Penelitian**

Penelitian ini mencakup ruang lingkup yang cukup besar yaitu 38 kabupaten/kota di Jawa Timur dengan kurun waktu penelitian ini adalah 2010-2015 karena pada waktu 2010-2015 tingkat pengangguran di Provinsi Jawa Timur menunjukkan penurunan yang signifikan tetapi tingkat pengangguran di Provinsi

Jawa Timur masih terbelang tinggi. Sedangkan tempat penelitian yang di jadikan objek penelitan adalah Provinsi Jawa Timur karena tingkat pengangguran Provinsi Jawa Timur terbesar nomer 4 di Pulau Jawa. Dengan mengamati beberapa faktor yang dapat memberi pengaruh terhadap tingkat pengangguran di Provinsi Jawa Timur.

#### 3.1.4 Jenis dan Sumber Data

Dalam penelitian ini menggunakan data sekunder. Data sekunder merupakan data yang didapatkan dari data yang sudah ada yaitu data yang diperoleh dalam bentuk jadi dan telah diolah oleh pihak lain atau instansi lain, yang biasanya dalam bentuk publikasi. Data yang diperlukan dalam penelitian ini diperoleh dari BPS Indonesia dan Jawa Timur dalam angka berupa data pengangguran, jumlah penduduk usia kerja, laju pertumbuhan ekonomi, dan upah minimum regional. Data yang digunakan dalam peneletian ini adalah data panel yaitu gabungan dari data *time series* dan *cross section*. Data *time series* yaitu meliputi kurun waktu tahun 2010-2015. Sedangkan data *cross section* adalah data kabupaten/kota provinsi Jawa Timur. Pengambilan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Tingkat Pengangguran Terbuka, Jumlah Penduduk Usia Kerja, laju Pertumbuhan Ekonomi, dan Upah Minimum Regional tahun 2010-2015.

### 3.2 Metode Analisis Data

#### 3.2.1 Analisis Panel Data

Dalam peneletian ini menggunakan analisis regresi linear berganda dengan menggunakan data panel (*pooling data*). Analisis dengan menggunakan *pooling data* adalah dengan mengkombinasi antara analisis *time series* dan *cross section* (Gujarati,2012:406). Regresi dengan menggunakan panel data (*pooling data*) memberikan beberapa keunggulan dibandingkan dengan pendekatan standar *cross section* dan *time series* diantaranya sebagai berikut:

- a. Data panel mampu menyediakan data yang lebih banyak, sehingga dapat memberikan informasi yang lebih lengkap. Sehingga diperoleh *degree of freedom* (df) yang lebih besar sehingga estimasi yang dihasilkan lebih baik.
- b. Dengan menggabungkan informasi dari data *time series* dan *cross section* dapat mengatasi masalah yang timbul karena ada masalah penghilangan variabel (*omitted variable*).
- c. Data panel mampu mengurangi kolinearitas antar variabel.
- d. Data panel lebih baik dalam mendeteksi dan mengukur efek yang secara sederhana tidak mampu dilakukan oleh data *time series* murni dan *cross section* murni.
- e. Dapat menguji dan membangun model perilaku yang lebih kompleks. Sebagai contoh, fenomena seperti skala ekonomi dan perubahan teknologi.
- f. Data panel dapat meminimalkan bias yang dihasilkan oleh agregat individu, karena data yang diobservasi lebih banyak.

Menurut Rosadi (2010:277-284) model dapat ditulis sebagai berikut :

$$Y_{it} = X_{it}\beta_{it} + \epsilon_{it}$$

Keterangan :

$Y_{it}$  = observasi dari unit ke-i dan diamati pada periode waktu ke-t (yakni variable dependen yang merupakan suatu data panel).

$X_{it}$  = konstanta, vektor k- variable independen/input/regresor dari unit ke-i dan diamati pada periode waktu ke-t (yakni terdapat k variable independen, dimana setiap variable merupakan data panel).

$\beta_{it}$  = sama dengan  $\beta$ , yakni pengaruh dari perubahan dalam X diasumsikan bersifat konstan dalam waktu dan kategori silang.

$\epsilon_{it}$  = komponen galat, yang diasumsikan memiliki harga mean 0 dan variansi homogenya dalam waktu (homoskedastisitas) serta independen dengan  $x_{it}$ .

Dengan melihat model di atas sehingga faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat pengangguran di Jawa Timur dapat digambarkan dengan fungsi sebagai berikut :

$$Y_{it} = f( JP_{it} + PE_{it} + UMR_{it} )$$

Dari persamaan fungsi diatas maka dapat di transformasikan ke dalam model ekonometrika sebagai berikut :

$$Y_{it} = \beta_0 + \beta_1 JP_{it} + \beta_2 PE_{it} + \beta_3 UMR_{it} + \epsilon_{it}$$

Keterangan :

Y = Tingkat pengangguran terbuka (persen)

JP = Jumlah Penduduk usia kerja (jiwa)

PE = Laju Pertumbuhan Ekonomi (persen)

UMR = Upah Minimum Regional (rupah)

i = *cross section*

t = *time series*

$\beta_0$  = Intercept

$\beta_1, \beta_2, \beta_3$  = Koefisien

$\epsilon_{it}$  = error

Menurut Juanda (2012:28-36) ada tiga metode data panel yang dapat digunakan, yaitu Metode *Pooled Ordinary Least Square*, *Fixed Effect Model / FEM* dan *Random Effect Model / REM*. Namun dalam penelitian ini menggunakan metode *Fixed Effect*.

#### 1) *Fixed Effect Model (FE)*

Model ini mengasumsikan bahwa perbedaan antar individu dapat diakomodasi dari perbedaan intersepnya. Untuk mengestimasi data panel model *Fixed Effect* menggunakan teknik *variable dummy* untuk menangkap perbedaan intersep antar perusahaan, perbedaan intersep bisa terjadi karena perbedaan budaya kerja, manajerial, dan insentif, namun demikian sloponya sama antar perusahaan. Model estimasi ini sering disebut dengan teknik *Least Squares Dummy Variable (LSDV)*. Model *Fixed Effect* satu arah sama dengan model linear

namun terdapat tambahan komponen yakni konstanta  $c_i$  dan  $d_t$ . Formulasinya dapat ditulis sebagai berikut :

$$Y_{it} = X_{it} \beta + c_i + d_t + \epsilon_{it}$$

Keterangan:

$c_i$  = konstanta yang bergantung pada unit ke- $i$ , tetapi tidak pada waktu  $t$ .

$d_t$  = konstanta yang bergantung pada unit ke- $t$ , tetapi tidak pada waktu  $i$ .

Jika memuat komponen  $c_i$  dan  $d_t$  maka disebut model efek tetap dua arah, sedangkan jika  $d_t = 0$  disebut model efek tetap satu arah.

## 2) *Random Effect Model (RE)*

Model ini akan mengestimasi data panel dimana variabel gangguan mungkin saling berhubungan antar waktu dan antar individu. Pada model *Random Effect* perbedaan intersep diakomodasi oleh *error terms* masing-masing perusahaan. Keuntungan menggunakan model *Random Effect* yakni menghilangkan heteroskedastisitas. Model ini juga disebut dengan *Error Component Model (ECM)* atau teknik *Generalized Least Square (GLS)*. Model *Random Effect* dapat ditulis sebagai berikut :

$$Y_{it} = X_{it} \beta + v_{it}$$

Keterangan:

$$v_{it} = c_i + d_t + \epsilon_{it}$$

$c_i$ , diasumsikan bersifat *independent* dan *identically distributed* (i.i.d)

### 3.2.2 Uji Spesifikasi Model

Menurut Rosadi (2010:277-284) untuk menganalisis data panel, diperlukan uji spesifikasi model yang tepat untuk menggambarkan data dengan kata lain untuk menentukan metode yang paling cocok dipilih antara *random effect* dan *fixed effect* dapat menggunakan beberapa pengujian yaitu uji Wald, uji Hausman dan uji Breusch-Pagan. Namun yang dipakai dalam penelitian ini adalah uji Hausman dan uji Chow untuk menentukan model pengelolaan data antara *random effect* atau *fixed effect* yakni sebagai berikut :



a. Uji Hausman

Uji Hausman dilakukan untuk melihat efek acak di dalam data panel yakni dengan melakukan uji hipotesis berbentuk  $H_0: E(C_i | X) = E(u) = 0$ , atau adanya efek acak di dalam model. Jika  $H_0$  di tolak maka model efek akan tetap digunakan. Dalam melakukan uji Hausman diperlukan asumsi bahwa banyaknya kategori silang lebih besar dari pada jumlah variabel bebas termasuk konstanta yang ada di dalam model. Hipotesis pengujianya adalah sebagai berikut :

$H_0$ : Model *Random effect*

$H_1$ : Model *Fixed effect*

Kriteria pengujianya adalah sebagai berikut:

- 1) Jika *Chi-Square statistic* > *Chi-Square* tabel maka  $H_0$  di tolak dan lebih menggunakan FEM
- 2) Jika *Chi-Square statistic* < *Chi-Square* tabel maka  $H_0$  di terima dan lebih menggunakan REM

b. Uji Chow

Uji Chow yakni pengujian untuk menentukan model *Fixed Effect* atau *Random Effect* yang paling tepat digunakan dalam mengestimasi data panel. Hipotesis dalam uji chow adalah:

$H_0$  : *Common Effect Model* atau *pooled OLS*

$H_1$  : *Fixed Effect Model*

Dasar penolakan terhadap hipotesis diatas adalah dengan membandingkan perhitungan F-statistik dengan F-tabel. Perbandingan dipakai apabila hasil F hitung lebih besar (>) dari F tabel maka  $H_0$  ditolak yang berarti model yang paling tepat digunakan adalah *Fixed Effect Model*. Begitupun sebaliknya, jika F hitung lebih kecil (<) dari F tabel maka  $H_0$  diterima dan model yang digunakan adalah *Common Effect Model* (Widarjono, 2013:27).

### 3.2.3 Uji Statistik

Uji statistik bertujuan untuk mengetahui pengaruh suatu variabel bebas terhadap variabel terikat. Pengujian ini dilakukan guna mengetahui apakah

hipotesis yang telah digunakan sesuai dengan kenyataan atau tidak. Dalam penelitian ini pengolahan data menggunakan *Eviews*, selain itu digunakan *Microsoft Excel* sebagai *software* pembantu dalam mengkonversi data kedalam bentuk baku oleh sumber kedalam bentuk yang lebih representatif untuk digunakan pada *software* utama dengan tujuan untuk meminimalkan kesalahan data bila dibandingkan dengan pencatatan ulang manual.

a. Uji F (Uji Simultan)

Uji ini digunakan untuk mengetahui apakah variabel-variabel bebas yang terdiri dari jumlah penduduk usia kerja, pertumbuhan ekonomi, upah minimum, berpengaruh terhadap variabel terikat yaitu tingkat pengangguran (Gujarati, 2012:406):

$$F = \frac{R^2}{k - 1} \div \frac{(1 - R^2)}{(n - k)}$$

Keterangan :

F = pengujian secara bersama-sama

$R^2$  = koefisien determinasi

k = jumlah variabel bebas

n = jumlah sampel yang dipakai

k-1 = derajat bebas pembilang

n-k = derajat bebas penyebut

Rumusan hipotesa:

$H_0 : \beta_1 = \beta_2 = \beta_3 = 0$  (tidak ada pengaruh)

$H_0 : \beta_1 = \beta_2 = \beta_3 \neq 0$  (ada pengaruh)

Dengan menggunakan  $\alpha=5\%$  maka pengujian hipotesis sebagai berikut (Gujarati, 2010:85) :

- 1) Bila f probabilitas  $\leq \alpha$ , berarti  $H_0$  ditolak dan  $H_a$  diterima, artinya ada pengaruh nyata antar variabel bebas dengan variabel terikat.

- 2) Bila  $f$  probabilitas  $> \alpha$ , berarti  $H_0$  diterima dan  $H_a$  ditolak, artinya bahwa tidak ada pengaruh nyata antar variabel bebas dengan variabel terikat.

b. Uji Statistik t (Uji Pengaruh secara parsial)

Uji t digunakan untuk menguji hubungan regresi secara parsial atau terpisah. Pengujian dilakukan untuk melihat kuat tidaknya pengaruh masing-masing variabel bebas secara terpisah terhadap variabel terikat t hitung dicari dengan rumus (Gujarati,2012:406):

$$t = \frac{b_1}{Sb_1}$$

Keterangan :

- t : t hitung (pengujian secara parsial)  
b<sub>i</sub> : besarnya perubahan dari variabel bebas  
Sb<sub>i</sub> : *standar error* deviasi

Rumusan hipotesa :

- 1)  $H_0 : b_1 = 0$ , artinya secara parsial tidak ada pengaruh yang signifikan antara masing-masing variabel bebas terhadap variabel terikat;
- 2)  $H_i : b_1 \neq 0$ , artinya secara parsial ada pengaruh yang signifikan antara masing-masing variabel bebas terhadap variabel terikat;

Kriteria pengujian :

- a) jika probabilitas t hitung  $\leq \alpha$  ( $\alpha = 5\%$ ), maka  $H_0$  ditolak dan  $H_i$  diterima artinya bahwa seluruh variabel bebas ada pengaruh secara nyata terhadap variabel terikat;
- b) jika probabilitas t hitung  $> \alpha$  ( $\alpha = 5\%$ ), maka  $H_0$  diterima dan  $H_i$  ditolak artinya bahwa seluruh variabel bebas tidak ada pengaruh secara nyata terhadap variabel terikat.

c. Koefisien Determinasi ( $R^2$ )

Untuk mengetahui kontribusi variabel bebas terhadap perubahan variabel terikat, maka akan ditinjau dari hasil uji koefisien determinan atau uji  $R^2$ . Nilai  $R^2$  ini terletak diantara 0 sampai dengan 1 ( $0 \leq R^2 \leq 1$ ). Semakin mendekati nilai 1

maka semakin besar nilai variasi variabel terikat yang dapat diterangkan secara bersama-sama oleh variabel bebas atau pengaruh presentase variabel  $X_1, X_2, X_3$  terhadap variabel  $Y$  adalah besar. Namun apabila variabel  $R^2$  mendekati 0, maka pengaruh prosentase variabel bebasnya terhadap variabel terikatnya yaitu tidak ada.

#### 3.2.4 Uji Asumsi Klasik

Suatu model dikatakan baik untuk alat prediksi apabila mempunyai sifat-sifat tidak bias linier terbaik suatu penaksir. Selain itu suatu model dikatakan cukup baik dan dapat dipakai untuk memprediksi apabila sudah lolos serangkaian uji asumsi klasik yang melandasinya. Uji asumsi klasik dalam penelitian ini terdiri dari :

##### a. Uji Multikolinieritas

Uji multikolinieritas digunakan untuk menguji model regresi apabila terjadi hubungan yang sempurna atau hampir sempurna antara variabel-variabel bebas sehingga sulit untuk memisahkan pengaruh antar variabel-variabel bebas itu secara individu terhadap variabel terikat. Multikolinieritas diduga terjadi jika nilai  $R^2$  tinggi dan nilai  $t$  semua variabel penjelas tidak signifikan, serta nilai  $F$  tinggi. Akibatnya adanya multikolinieritas sempurna adalah koefisien-koefisien regresi menjadi tidak dapat ditaksir dan nilai simpangan baku setiap koefisien regresi menjadi tidak terhingga. Untuk mendeteksinya adalah dengan menguji koefisien korelasi ( $r$ ) antar variabel independen. Jika koefisien korelasi cukup tinggi diatas 0,85 maka diduga terdapat multikolinieritas dalam model. Sebaliknya, jika koefisien korelasi rendah di bawah 0,85 maka model tersebut tidak terdapat masalah multikolinieritas (Widarjono, 2013:362).

##### b. Uji Heteroskedesitas

Uji heteroskedesitas digunakan mengetahui apakah variabel gangguan mempunyai varian yang tidak konstan atau berubah-ubah. Untuk mendeteksi adanya heteroskedesitas pada penelitian ini adalah uji park yang dikembangkan pada tahun 1996 yaitu cara menambah 1 variabel residual kuadrat, variabel residual baru akan dihitung dengan estimasi (regresi). Jika  $t_{hitung} < t_{table}$  maka model terkena heteroskedesitas.

c. Uji Normalitas

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah suatu model regresi variabel independen, variabel dependen atau keduanya mempunyai distribusi normal atau mutlak. Regresi yang baik adalah berada di distribusi normal atau mendekati normal. Mendekati normalitas dengan melihat penyebaran data titik pada sumbu diagonal dari grafik. Dasar pengambil keputusannya adalah:

- 1) Jika ada penyebar disekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis diagonal, maka model regresi memenuhi asumsi normalitas
- 2) Jika dalam penyebaran jauh dari garis diagonal atau tidak mengikuti arah garis diagonal, maka model regresi tidak memenuhi asumsi normalitas.

Cara lain untuk menguji apakah normal atau tidaknya faktor pengganggu adalah dengan menggunakan jarque-bera test (JB test), yaitu dengan melihat angka probabilitasnya.

### 3.3 Definisi Variabel Operasional

Variabel operasional merupakan variabel yang digunakan dalam penelitian ini di ambil dari kebutuhan data dan alat analisis yang di pergunakan. Definisi operasional adalah penjelasan dari masing-masing variabel tersebut antara lain:

- a. Tingkat Pengangguran Terbuka (Y)  
Perbandingan antara pencari kerja dengan angkatan kerja perkabupaten di Provinsi Jawa Timur, ditunjukkan dalam satuan persen (%).
- b. Jumlah Penduduk Usia Kerja (X1)  
Jumlah penduduk yang berumur 15 tahun dan lebih yang tercatat di kabupaten/kota di Provinsi Jawa Timur, ditunjukkan dalam jiwa.
- c. Laju Pertumbuhan Ekonomi (X2)  
Pertumbuhan nilai produksi barang dan jasa per kabupaten di Provinsi Jawa Timur dalam penelitian ini di gambarkan pada PDRB atas harga yang berlaku, ditunjukkan dalam persen (%).
- d. Upah Minimum (X3)  
Upah minimum yang berlaku di wilayah kabupaten/kota di Provinsi Jawa Timur, ditunjukkan dalam rupiah.

## BAB 5. KESIMPULAN DAN SARAN

### 5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil dan pembahasan yang telah peneliti jelaskan maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Hasil pengujian regresi data panel atas jumlah penduduk usia kerja terhadap tingkat pengangguran terbuka di Provinsi Jawa Timur menunjukkan hubungan negatif dan signifikan. Ini membuktikan bahwa semakin tinggi jumlah penduduk usia kerja maka tingkat pengangguran terbuka di Provinsi Jawa Timur menurun. Dengan adanya peningkatan jumlah UMKM dan wirausaha akan mengurangi jumlah pengangguran.
2. Hasil pengujian regresi data panel atas laju pertumbuhan ekonomi terhadap tingkat pengangguran terbuka di Provinsi Jawa Timur menunjukkan hubungan negatif dan signifikan. Ini membuktikan bahwa semakin tinggi laju pertumbuhan ekonomi maka tingkat pengangguran terbuka di Provinsi Jawa Timur menurun.
3. Hasil pengujian regresi data panel upah minimum regional terhadap tingkat pengangguran terbuka di Provinsi Jawa Timur menunjukkan hubungan yang negatif tidak signifikan, sehingga ketika terjadi peningkatan atau pengurangan upah minimum maka tidak berpengaruh terhadap tingkat pengangguran terbuka di Provinsi Jawa Timur.

### 5.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, beberapa saran yang diberikan antara lain:

1. Dengan memperlambat laju pertumbuhan penduduk (meminimalisirkan menikah pada usia dini) yang diharapkan dapat menekan laju pertumbuhan angkatan kerja baru atau melancarkan sistem transmigrasi dengan mengalokasikan penduduk padat ke daerah yang jarang penduduk dengan difasilitasi sektor pertanian, perkebunan, atau perternakan oleh pemerintah.

2. Pemerintah memberikan bantuan wawasan, pengetahuan dan kemampuan jiwa kewirausahaan kepada Usaha Kecil dan Menengah (UKM) berupa bimbingan teknis dan manajemen memberikan bantuan modal, perluasan pasar. Serta pemberian fasilitas agar dapat tumbuh secara mandiri dan andal bersaing di bidangnya. Mendorong terbentuknya kelompok usaha bersama dan lingkungan usaha yang menunjang dan mendorong terwujudnya pengusaha kecil dan menengah yang mampu mengembangkan usaha, menguasai teknologi dan informasi pasar dan peningkatan pola kemitraan UKM dengan BUMN, BUMD, BUMS dan pihak lainnya. Hal ini akan menyelesaikan masalah pembangunan yaitu salah satunya pengangguran
3. Dengan minimnya penghasilan dari perusahaan, khususnya perusahaan menengah ke bawah yang masih banyak di kabupaten/kota Provinsi Jawa Timur yang tidak mampu untuk membayar pekerjanya sesuai dengan upah minimum regional. Untuk mengurangi dampak yang ditimbulkan dari kebijakan upah minimum regional Pegawai Dinas Sosial dan Tenaga Kerja juga melakukan suatu upaya negosiasi antara pengusaha dan pekerja, yang di dalamnya akan dibuat kesepakatan antara perusahaan dan buruh berkenaan dengan pengupahan sehingga tidak ada yang merasa dirugikan, tidak jarang ada perusahaan yang meskipun tidak mampu membayar upah buruh sesuai upah minimum regional yang telah ada, untuk menyesuaikan pemberian upah sesuai dengan upah minimum regional dengan memberi uang tambahan yang berupa uang makan, uang jalan dll. Dengan diberikan upah tambahan tersebut maka upah yang diterima buruh setidaknya mendekati upah minimum regional yang diharapkan mampu memenuhi kebutuhan hidupnya.

**DAFTAR PUSTAKA**

- Alghofari, Farid. 2010. Analisis Tingkat pengangguran di Indonesia Tahun 1980 – 2007. *Tesis*. Semarang: Program Pasca Sarjana Universitas Diponegoro.
- Amri, Amir. 2007. Pengaruh Inflasi dan Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Pengangguran di Indonesia. *Jurnal Inflasi dan Pengangguran*. 1(1): 4-9.
- Arikunto, Suharsimi. 2009. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Badan Pusat Statistik. 2008. *Jawa Timur Dalam Angka berbagai Edisi*. Surabaya: Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Timur.
- Badan Pusat Statistik. 2012. *Perkembangan Berbagai Indikator Utama Sosial-Ekonomi Indonesia*. Jakarta: Badan Pusat Statistik.
- Badan Pusat Statistik. 2017. *Produk Domestik Regional Bruto*. Jakarta: Badan Pusat Statistik.
- Badan Pusat Statistik. 2017. *Tingkat Pengangguran Terbuka*. Jakarta: Badan Pusat Statistik.
- Badan Pusat Statistik. 2017. *Tenaga Kerja Jawa Timur*. Surabaya: Badan Pusat Statistik.
- Cholili, Fatkhul Mufid. 2014. Analisis Pengaruh Pengangguran Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) terhadap Jumlah Penduduk Miskin (Studi Kasus 33 Provinsi di Indonesia). *Skripsi*. Malang: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya.
- Dharmayanti, Yenny. 2011. Analisis Pengaruh PDRB Upah dan Inflasi Terhadap Pengangguran Terbuka di Provinsi Jawa Tengah Tahun 1991-2009. *Skripsi*. Semarang: Fakultas Ekonomi Universitas Diponegoro.
- Gozali, Imam. 2013. *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program SPSS*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Gujarati, Damodar N. 2012. *Ekonometrika Dasar*. Jakarta: Salemba Empat.
- Isitifadah, Nurul. 2015. Peran, Penyerapan Tenaga Kerja serta Inovasi UMKM dalam Membangun Kewirausahaan yang Berkelanjutan di Jawa Timur. *Jurnal Riset Ekonomi dan Manajemen*. 15(1): 190-203.



- Jhingan, M. L. 2012. *Ekonomi Pembangunan dan Perencanaan*. Jakarta: Rajawali Press.
- Juanda, Bambang dan Junaidi. 2012. *Ekonomi Deret Waktu*. Bogor: PT Penerbit IPB Press.
- Kuncoro, Mudrajad. 1997. *Dasar-dasar Ekonometrika Pembangunan*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN
- Kurniawan, Roby Cahyadi. 2013. Analisis Pengaruh PDRB, UMK, dan Inflasi Terhadap Tingkat Pengangguran Terbuka di Kota Malang Tahun 1980-2011. *Skripsi*. Malang: Fakultas Ekonomi Universitas Brawijaya.
- Lindra, Ayudha. 2014. Analisis Pengaruh Tingkat Upah Minimum, Inflasi, dan Jumlah Penduduk Terhadap Pengangguran di Kota Malang (1996 – 2013). *Skripsi*. Malang: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya.
- Marhaeni, AAIN. 2013. Analisis Beberapa Faktor yang Berpengaruh terhadap Jumlah Pengangguran kabupaten/kota di Provinsi Bali. *E-jurnal EP Unud*. 2(2): 108-118.
- Muslim, Muhammad Rifqi. 2014. Pengangguran Terbuka dan Determinannya di Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2007-2012. *Jurnal Ekonomi dan Studi Pembangunan*. 15(2): 171-181.
- Nainggola, Indra Oloan. 2007. Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kesempatan Kerja pada Kabupaten/Kota di Propinsi Sumatera Utara. *Skripsi*. Medan: Fakultas Ekonomi Universitas Sumatera Utara.
- Rosadi, Dedi. 2010. *Analisis Ekonometrika Dan Runtun Waktu Terapan Dengan R Aplikasi*. Yogyakarta: C.V Andi Offset.
- Senet, P. D. R., dan N.Y. Yuliarini. 2014. Faktor- Faktor yang Mempengaruhi Jumlah Pengangguran di Provinsi Bali. *E-Jurnal EP Unud*. 3(6) : 237-246.
- Setiadi. 2009. Pengaruh Upah dan Jaminan Sosial Terhadap Produktivitas Kerja Karyawan. *Skripsi*. Semarang: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Diponegoro.
- Sopianti, Ni Komang. 2013. Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Tingkat Inflasi dan Upah Minimum Terhadap Jumlah Pengangguran di Bali. *Jurnal Ekonomi Pembangunan*. 2(4) :173-225.
- Sugiyono. 2013. *Metode Penelitian Kuantitatif dan R & D*. Bandung: Alfabeta.

Sukirno, Sadono. 2008. *Makro Ekonomi Modern*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

Sukirno, Sadono. 2010. *Pengantar Teori Ekonomi Makro*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

Tarigan, Robinson. 2008. *Perencanaan Pembangunan Wilayah*. Jakarta: PT Bumi Aksara

Todaro, Michael, P. 2006. *Pembangunan Ekonomi di Dunia Ketiga*. Jakarta: Erlangga.

Widarjono, Agus. 2013. *Ekonometrika Pengantar dan Aplikasinya*. Yogyakarta: Ekonosia.



## LAMPIRAN

## Lampiran A

**Tabel Data Tingkat Pengangguran Terbuka (Y), Jumlah Penduduk Usia Kerja (X1), Laju Pertumbuhan Ekonomi (X2) dan Upah minimum (X3)**

Tahun	Kota/Kabupaten	TPT (%)	JPUK (jiwa)	PDRB (%)	UMR (Rupiah)
2010	Kab.Pacitan	1,40	422.086	6,53	630.000
2011	Kab.Pacitan	2,70	412.701	6,29	705.000
2012	Kab.Pacitan	1,16	424.485	6,33	750.000
2013	Kab.Pacitan	0,12	424.696	5,87	887.200
2014	Kab.Pacitan	1,08	434.802	5,21	1.000.000
2015	Kab.Pacitan	0,97	437.962	5,10	1.150.000
2010	Kab.Ponorogo	3,83	668.477	5,78	635.000
2011	Kab.Ponorogo	4,37	673.893	5,70	705.000
2012	Kab.Ponorogo	3,26	673.908	5,98	745.000
2013	Kab.Ponorogo	3,25	671.327	5,14	924.000
2014	Kab.Ponorogo	3,66	686.530	5,21	1.000.000
2015	Kab.Ponorogo	3,68	690.836	5,25	1.150.000
2010	Kab.Trenggalek	2,15	521.436	6,11	635.000
2011	Kab.Trenggalek	3,27	525.232	5,94	710.000
2012	Kab.Trenggalek	3,14	526.626	6,21	760.000
2013	Kab.Trenggalek	4,04	526.403	6,00	903.900
2014	Kab.Trenggalek	4,20	539.318	5,28	1.000.000
2015	Kab.Trenggalek	2,46	543.532	5,03	1.150.000
2010	Kab.Tulungagung	3,50	747.061	6,48	641.000
2011	Kab.Tulungagung	3,58	747.435	6,37	720.000
2012	Kab.Tulungagung	3,18	755.386	6,47	815.000
2013	Kab.Tulungagung	2,71	757.818	6,13	1.007.900
2014	Kab.Tulungagung	2,42	778.794	5,46	1.107.000
2015	Kab.Tulungagung	3,95	786.268	4,99	1.237.000
2010	Kab. Blitar	2,24	846.277	6,08	655.000
2011	Kab. Blitar	3,61	847.970	5,43	750.000
2012	Kab. Blitar	2,86	853.260	5,62	820.000
2013	Kab. Blitar	3,64	855.357	5,06	946.800
2014	Kab. Blitar	3,08	876.818	5,02	1.000.000
2015	Kab. Blitar	2,79	884.420	5,05	1.260.000
2010	Kab. Kediri	3,75	1.121.830	6,03	837.000
2011	Kab. Kediri	4,54	1.138.365	6,03	934.500
2012	Kab. Kediri	4,16	1.133.257	6,11	999.000
2013	Kab. Kediri	4,65	1.137.745	5,82	1.089.500

Tahun	Kota/Kabupaten	TPT	JPUK (jiwa)	PDRB	UMR
2014	Kab. Kediri	4,91	1.167.695	5,32	1.135.000
2015	Kab. Kediri	5,02	1.178.989	4,88	1.305.200
2010	Kab. Malang	4,49	1.839.891	6,27	1.000.000
2011	Kab. Malang	4,63	1.867.183	6,65	1.077.600
2012	Kab. Malang	3,79	1.857.600	6,77	1.130.500
2013	Kab. Malang	5,17	1.875.313	5,30	1.343.700
2014	Kab. Malang	4,83	1.928.383	6,01	1.635.000
2015	Kab. Malang	4,95	1.949.870	5,27	1.882.200
2010	Kab. Lumajang	3,17	764.302	5,92	688.000
2011	Kab. Lumajang	3,16	766.694	6,20	740.700
2012	Kab. Lumajang	4,60	770.993	6,00	825.400
2013	Kab. Lumajang	2,01	772.374	5,58	1.011.900
2014	Kab. Lumajang	2,83	790.639	5,32	1.120.000
2015	Kab. Lumajang	2,60	797.023	4,62	1.288.000
2010	Kab. Jember	2,71	1.751.147	6,05	830.000
2011	Kab. Jember	3,95	1.751.643	5,49	875.000
2012	Kab. Jember	3,91	1.759.627	5,83	920.000
2013	Kab. Jember	3,94	1.767.622	6,06	1.091.900
2014	Kab. Jember	4,64	1.815.845	6,21	1.270.000
2015	Kab. Jember	4,77	1.833.495	5,36	1.460.500
2010	Kab. Banyuwangi	3,92	1.176.257	6,22	824.000
2011	Kab. Banyuwangi	3,71	1.181.005	6,95	865.000
2012	Kab. Banyuwangi	3,41	1.187.058	7,24	915.000
2013	Kab. Banyuwangi	4,65	1.187.185	6,71	1.086.400
2014	Kab. Banyuwangi	7,17	1.216.443	5,72	1.240.000
2015	Kab. Banyuwangi	2,55	1.226.510	6,01	1.426.000
2010	Kab. Bondowoso	1,59	566.842	5,64	668.000
2011	Kab. Bondowoso	2,84	562.806	6,07	735.000
2012	Kab. Bondowoso	3,75	571.271	6,09	800.000
2013	Kab. Bondowoso	2,04	574.609	5,81	946.000
2014	Kab. Bondowoso	3,72	589.874	5,05	1.105.000
2015	Kab. Bondowoso	1,75	595.589	4,95	1.270.700
2010	Kab. Situbondo	3,13	502.353	5,75	660.000
2011	Kab. Situbondo	4,74	504.374	5,38	737.000
2012	Kab. Situbondo	3,31	508.171	5,43	802.500
2013	Kab. Situbondo	3,01	510.015	6,19	1.048.000
2014	Kab. Situbondo	4,15	524.362	5,79	1.071.000
2015	Kab. Situbondo	3,57	529.490	4,86	1.209.900
2010	Kab. Probolinggo	2,02	823.155	6,19	744.000
2011	Kab. Probolinggo	3,20	813.424	5,88	814.000
2012	Kab. Probolinggo	1,98	827.914	6,44	888.500
2013	Kab. Probolinggo	3,30	835.139	5,15	1.198.600

Tahun	Kota/Kabupaten	TPT	JPUK (jiwa)	PDRB	UMR
2014	Kab. Probolinggo	1,47	860.044	4,90	1.353.700
2015	Kab. Probolinggo	2,51	869.658	4,76	1.556.800
2010	Kab. Pasuruan	3,49	1.129.572	6,14	1.005.000
2011	Kab. Pasuruan	4,83	1.135.151	6,69	1.170.000
2012	Kab. Pasuruan	6,43	1.142.372	7,50	1.252.000
2013	Kab. Pasuruan	4,34	1.157.066	6,95	1.720.000
2014	Kab. Pasuruan	4,43	1.189.864	6,74	2.190.000
2015	Kab. Pasuruan	6,41	1.203.914	5,38	2.700.000
2010	Kab. Sidoarjo	8,35	1.454.978	5,62	1.005.000
2011	Kab. Sidoarjo	4,74	1.455.520	7,04	1.107.000
2012	Kab. Sidoarjo	5,21	1.461.686	7,26	1.252.000
2013	Kab. Sidoarjo	4,12	1.517.801	6,89	1.720.000
2014	Kab. Sidoarjo	3,88	1.574.497	6,44	2.190.000
2015	Kab. Sidoarjo	6,30	1.605.518	5,24	2.705.000
2010	Kab. Mojokerto	4,84	773.288	6,74	1.009.100
2011	Kab. Mojokerto	4,31	772.036	6,61	1.105.000
2012	Kab. Mojokerto	3,42	778.774	7,26	1.234.000
2013	Kab. Mojokerto	3,16	790.417	6,56	1.700.000
2014	Kab. Mojokerto	3,81	816.260	6,45	2.050.000
2015	Kab. Mojokerto	4,05	827.126	5,65	2.695.000
2010	Kab. Jombang	5,27	894.352	6,12	790.000
2011	Kab. Jombang	4,24	899.968	5,96	866.500
2012	Kab. Jombang	6,69	904.625	6,15	978.200
2013	Kab. Jombang	5,59	910.754	5,93	1.200.000
2014	Kab. Jombang	4,39	932.028	5,42	1.500.000
2015	Kab. Jombang	6,11	941.171	5,36	1.725.000
2010	Kab. Nganjuk	3,64	767.420	6,28	650.000
2011	Kab. Nganjuk	4,73	771.607	5,75	710.000
2012	Kab. Nganjuk	4,22	775.680	5,85	785.000
2013	Kab. Nganjuk	4,73	775.942	5,40	960.200
2014	Kab. Nganjuk	3,93	794.978	5,10	1.131.000
2015	Kab. Nganjuk	2,10	801.744	5,18	1.265.000
2010	Kab. Madiun	5,55	510.906	5,92	660.000
2011	Kab. Madiun	3,37	514.706	6,02	720.000
2012	Kab. Madiun	3,99	515.459	6,12	775.000
2013	Kab. Madiun	4,16	515.500	5,67	960.700
2014	Kab. Madiun	3,38	527.879	5,34	1.045.000
2015	Kab. Madiun	6,99	531.983	5,26	1.196.000
2010	Kab. Magetan	2,41	485.094	5,79	650.000
2011	Kab. Magetan	3,16	485.710	5,64	705.000
2012	Kab. Magetan	3,86	489.406	5,79	750.000
2013	Kab. Magetan	2,96	486.006	5,85	866.200

Tahun	Kota/Kabupaten	TPT	JPUK (jiwa)	PDRB	UMR
2014	Kab. Magetan	4,28	496.876	5,10	1.000.000
2015	Kab. Magetan	6,05	499.736	5,17	1.150.000
2010	Kab. Ngawi	4,80	632.468	6,09	650.000
2011	Kab. Ngawi	4,06	639.238	6,11	710.000
2012	Kab. Ngawi	3,05	637.503	6,63	785.000
2013	Kab. Ngawi	4,97	634.194	5,50	960.200
2014	Kab. Ngawi	5,61	649.952	5,82	1.131.000
2015	Kab. Ngawi	3,99	653.524	5,08	1.265.000
2010	Kab. Bojonegoro	3,29	927.687	11,84	825.000
2011	Kab. Bojonegoro	4,18	936.578	10,39	870.000
2012	Kab. Bojonegoro	3,51	937.249	3,77	930.000
2013	Kab. Bojonegoro	5,81	937.192	2,37	1.023.500
2014	Kab. Bojonegoro	3,21	959.525	2,29	1.140.000
2015	Kab. Bojonegoro	5,01	966.875	17,42	1.311.000
2010	Kab. Tuban	2,86	856.499	6,22	870.000
2011	Kab. Tuban	4,15	860.740	6,84	935.000
2012	Kab. Tuban	4,25	863.396	6,29	970.000
2013	Kab. Tuban	4,30	867.819	5,85	1.144.400
2014	Kab. Tuban	3,63	889.362	5,47	1.370.000
2015	Kab. Tuban	3,03	897.601	4,89	1.575.500
2010	Kab. Lamongan	3,62	899.774	6,89	875.000
2011	Kab. Lamongan	4,40	909.502	6,67	900.000
2012	Kab. Lamongan	4,98	906.179	6,92	950.000
2013	Kab. Lamongan	4,93	899.237	6,93	1.075.700
2014	Kab. Lamongan	4,30	917.856	6,30	1.220.000
2015	Kab. Lamongan	4,10	922.451	5,77	1.410.000
2010	Kab. Gresik	7,70	875.024	6,86	1.010.400
2011	Kab. Gresik	4,36	874.446	6,48	1.130.000
2012	Kab. Gresik	6,72	878.218	6,92	1.257.000
2013	Kab. Gresik	4,55	901.602	6,05	1.740.000
2014	Kab. Gresik	5,06	930.851	7,04	2.195.000
2015	Kab. Gresik	5,67	945.594	6,58	2.707.500
2010	Kab. Bangkalan	5,79	640.085	5,44	755.000
2011	Kab. Bangkalan	3,91	644.911	3,31	850.000
2012	Kab. Bangkalan	5,32	647.906	1,42	885.000
2013	Kab. Bangkalan	6,78	659.783	0,19	983.000
2014	Kab. Bangkalan	5,68	681.794	7,19	1.102.000
2015	Kab. Bangkalan	5,00	691.155	2,66	1.267.300
2010	Kab. Sampang	1,77	614.287	5,34	690.000
2011	Kab. Sampang	3,91	614.822	2,50	725.000
2012	Kab. Sampang	1,78	621.798	5,77	800.000
2013	Kab. Sampang	4,68	636.187	6,53	1.104.600

Tahun	Kota/Kabupaten	TPT	JPUK (jiwa)	PDRB	UMR
2014	Kab. Sampang	2,22	660.478	0,08	1.120.000
2015	Kab. Sampang	2,51	671.357	2,08	1.231.600
2010	Kab. Pamekasan	3,53	586.242	5,75	900.000
2011	Kab. Pamekasan	2,89	571.261	6,22	925.000
2012	Kab. Pamekasan	2,29	592.081	6,25	975.000
2013	Kab. Pamekasan	2,17	605.065	6,10	1.059.600
2014	Kab. Pamekasan	2,14	624.787	5,62	1.090.000
2015	Kab. Pamekasan	4,26	634.253	5,32	1.201.700
2010	Kab. Sumenep	1,89	811.430	5,64	730.000
2011	Kab. Sumenep	3,71	805.766	6,13	785.000
2012	Kab. Sumenep	1,19	816.436	9,96	825.000
2013	Kab. Sumenep	2,56	819.531	1,45	965.000
2014	Kab. Sumenep	1,01	840.028	6,23	1.090.000
2015	Kab. Sumenep	2,07	847.455	1,27	1.253.500
2010	Kota Kediri	7,39	201.920	5,91	906.000
2011	Kota Kediri	4,93	206.738	4,29	975.000
2012	Kota Kediri	7,85	207.065	5,27	1.037.500
2013	Kota Kediri	7,92	209.705	3,52	1.128.400
2014	Kota Kediri	7,66	214.574	5,85	1.165.000
2015	Kota Kediri	8,46	217.088	5,36	1.339.700
2010	Kota Blitar	6,66	99.254	6,32	663.000
2011	Kota Blitar	4,20	100.223	6,43	737.000
2012	Kota Blitar	3,55	100.582	6,52	815.000
2013	Kota Blitar	6,17	101.435	6,50	924.800
2014	Kota Blitar	5,71	104.376	5,88	1.000.000
2015	Kota Blitar	3,80	105.681	5,68	1.243.200
2010	Kota Malang	8,68	615.131	6,25	1.006.200
2011	Kota Malang	5,19	646.979	6,04	1.079.800
2012	Kota Malang	7,68	644.163	6,26	1.132.200
2013	Kota Malang	7,73	649.352	6,20	1.340.300
2014	Kota Malang	7,22	665.465	5,80	1.587.000
2015	Kota Malang	7,28	671.937	5,61	1.882.200
2010	Kota Probolinggo	6,85	126.079	6,12	741.000
2011	Kota Probolinggo	4,66	146.506	5,95	810.500
2012	Kota Probolinggo	5,12	161.550	6,49	885.000
2013	Kota Probolinggo	4,48	163.931	6,47	1.103.200
2014	Kota Probolinggo	5,16	169.582	5,93	1.250.000
2015	Kota Probolinggo	4,01	171.876	5,86	1.437.500
2010	Kota Pasuruan	7,23	130.134	5,66	865.000
2011	Kota Pasuruan	4,92	136.623	6,28	926.000
2012	Kota Pasuruan	4,34	137.712	6,31	975.000
2013	Kota Pasuruan	5,41	139.729	6,51	1.195.800

Tahun	Kota/Kabupaten	TPT	JPUK (jiwa)	PDRB	UMR
2014	Kota Pasuruan	6,09	143.301	5,70	1.360.000
2015	Kota Pasuruan	5,57	144.996	5,53	1.575.000
2010	Kota Mojokerto	7,52	90.032	6,09	805.000
2011	Kota Mojokerto	5,86	90.550	5,97	835.000
2012	Kota Mojokerto	7,32	91.346	6,09	875.000
2013	Kota Mojokerto	5,73	92.218	6,20	1.040.000
2014	Kota Mojokerto	4,42	94.943	5,83	1.250.000
2015	Kota Mojokerto	4,88	96.000	5,74	1.437.500
2010	Kota Madiun	9,52	131.526	6,93	685.000
2011	Kota Madiun	5,15	132.023	6,79	745.000
2012	Kota Madiun	6,71	133.930	6,83	812.500
2013	Kota Madiun	6,57	133.696	7,68	953.000
2014	Kota Madiun	6,93	136.320	6,62	1.066.000
2015	Kota Madiun	5,10	137.521	6,15	1.250.000
2010	Kota Surabaya	6,84	2.121.379	7,09	1.031.500
2011	Kota Surabaya	5,15	2.152.931	7,13	1.115.000
2012	Kota Surabaya	5,07	2.147.116	7,35	1.257.000
2013	Kota Surabaya	5,32	2.155.107	7,58	1.740.000
2014	Kota Surabaya	7,82	2.201.854	6,96	2.200.000
2015	Kota Surabaya	7,01	2.220.853	5,97	2.710.000
2010	Kota Batu	5,55	143.150	7,01	989.000
2011	Kota Batu	4,57	142.902	7,13	1.050.000
2012	Kota Batu	3,41	145.140	7,26	1.100.200
2013	Kota Batu	2,30	147.011	7,29	1.268.000
2014	Kota Batu	2,43	151.705	6,90	1.580.000
2015	Kota Batu	4,29	153.794	6,69	1.877.000



**Lampiran B****Uji Chow**

Redundant Fixed Effects Tests

Equation: Untitled

Test cross-section fixed effects

Effects Test	Statistic	d.f.	Prob.
Cross-section F	9.711434	(37,187)	0.0000
Cross-section Chi-square	244.439230	37	0.0000

Cross-section fixed effects test equation:

Dependent Variable: Y

Method: Panel Least Squares

Date: 08/14/18 Time: 22:10

Sample: 2010 2015

Periods included: 6

Cross-sections included: 38

Total panel (balanced) observations: 228

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	-10.35959	4.828620	-2.145455	0.0330
X1	-0.545602	0.135109	-4.038249	0.0001
X2	0.054797	0.092518	0.592285	0.5543
X3	1.559108	0.349456	4.461525	0.0000
R-squared	0.118850	Mean dependent var		4.315789
Adjusted R-squared	0.107049	S.D. dependent var		1.665187
S.E. of regression	1.573537	Akaike info criterion		3.761917
Sum squared resid	554.6282	Schwarz criterion		3.822081
Log likelihood	-424.8585	Hannan-Quinn criter.		3.786191
F-statistic	10.07106	Durbin-Watson stat		0.864373
Prob(F-statistic)	0.000003			

**Lampiran C****Uji Hausman Test**

Correlated Random Effects - Hausman Test

Equation: Untitled

Test cross-section random effects

Test Summary	Chi-Sq. Statistic	Chi-Sq. d.f.	Prob.
Cross-section random	28.523517	3	0.0000

Cross-section random effects test comparisons:

Variable	Fixed	Random	Var(Diff.)	Prob.
X1	-5.050242	-0.518403	3.031349	0.0092
X2	-0.204210	-0.081496	0.001942	0.0054
X3	-0.013111	0.163429	0.030682	0.3135

Cross-section random effects test equation:

Dependent Variable: Y

Method: Panel Least Squares

Date: 08/14/18 Time: 22:12

Sample: 2010 2015

Periods included: 6

Cross-sections included: 38

Total panel (balanced) observations: 228

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	72.80578	22.05647	3.300881	0.0012
X1	-5.050242	1.756284	-2.875527	0.0045
X2	-0.204210	0.096726	-2.111230	0.0361
X3	-0.013111	0.339412	-0.038627	0.9692

**Effects Specification**

Cross-section fixed (dummy variables)

R-squared	0.698393	Mean dependent var	4.315789
Adjusted R-squared	0.633878	S.D. dependent var	1.665187
S.E. of regression	1.007572	Akaike info criterion	3.014377
Sum squared resid	189.8427	Schwarz criterion	3.631057
Log likelihood	-302.6389	Hannan-Quinn criter.	3.263189
F-statistic	10.82528	Durbin-Watson stat	2.352649
Prob(F-statistic)	0.000000		

**Lampiran D****Estimasi Fixed Effect**

Dependent Variable: Y

Method: Panel Least Squares

Date: 08/14/18 Time: 22:15

Sample: 2010 2015

Periods included: 6

Cross-sections included: 38

Total panel (balanced) observations: 228

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	72.80578	22.05647	3.300881	0.0012
X1	-5.050242	1.756284	-2.875527	0.0045
X2	-0.204210	0.096726	-2.111230	0.0361
X3	-0.013111	0.339412	-0.038627	0.9692

**Effects Specification**

Cross-section fixed (dummy variables)

R-squared	0.698393	Mean dependent var	4.315789
Adjusted R-squared	0.633878	S.D. dependent var	1.665187
S.E. of regression	1.007572	Akaike info criterion	3.014377
Sum squared resid	189.8427	Schwarz criterion	3.631057
Log likelihood	-302.6389	Hannan-Quinn criter.	3.263189
F-statistic	10.82528	Durbin-Watson stat	2.352649
Prob(F-statistic)	0.000000		

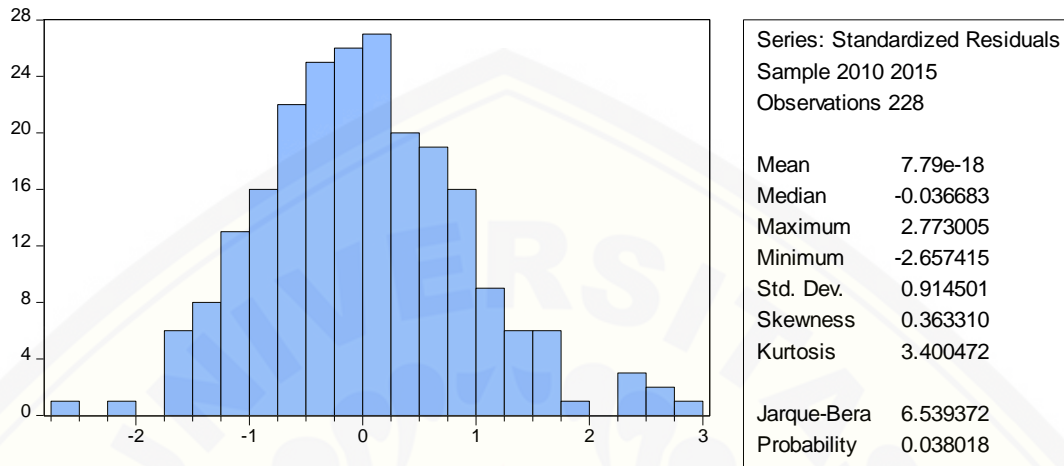
## Lampiran E

Hasil Estimasi *Cross-section Fixed Effect*

KABUPATEN	Effect
Kab.Pacitan	-4.556846
Kab.Ponorogo	-0.021735
Kab.Trenggalek	-1.686464
Kab.Tulungagung	0.217940
Kab. Blitar	0.521661
Kab. Kediri	3.505032
Kab. Malang	6.232420
Kab. Lumajang	0.017711
Kab. Jember	5.236484
Kab. Banyuwangi	3.572942
Kab. Bondowoso	-1.875219
Kab. Situbondo	-1.436588
Kab. Probolinggo	-0.197591
Kab. Pasuruan	4.228859
Kab. Sidoarjo	5.980709
Kab. Mojokerto	1.247604
Kab. Jombang	3.263445
Kab. Nganjuk	0.931888
Kab. Madiun	-0.421817
Kab. Magetan	-1.532001
Kab. Ngawi	0.512690
Kab. Bojonegoro	1.912426
Kab. Tuban	1.372913
Kab. Lamongan	2.398624
Kab. Gresik	3.659415
Kab. Bangkalan	0.984104
Kab. Sampang	-1.568106
Kab. Pamekasan	-1.336576
Kab. Sumenep	-0.515861
Kota Kediri	-2.350542
Kota Blitar	-8.102759
Kota Malang	3.491290
Kota Probolinggo	-5.944949
Kota Pasuruan	-6.010986
Kota Mojokerto	-7.698199
Kota Madiun	-4.940436
Kota Surabaya	8.236161
Kota Batu	-7.327643

**Lampiran F**

**Uji Normalitas**



**Lampiran G**

**Uji Multikolinearitas**

	X1	X2	X3
X1	1,000000	-0.052110	0.220860
X2	-0.052110	1,000000	-0.024096
X3	0.220860	-0.024096	1,000000

**Lampiran H****Uji Autokorelasi**

Dependent Variable: Y

Method: Panel Least Squares

Date: 08/14/18 Time: 18:46

Sample: 2010 2015

Periods included: 6

Cross-sections included: 38

Total panel (balanced) observations: 228

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	76.23990	22.57552	3.377105	0.0009
X1	-5.312408	1.794482	-2.960413	0.0035
X2	-0.201633	0.096909	-2.080641	0.0388
X3	-0.464441	0.703404	-0.660276	0.5099
X4	0.093378	0.127420	0.732839	0.4646

**Effects Specification****Cross-section fixed (dummy variables)**

R-squared	0.699261	Mean dependent var	4.315789
Adjusted R-squared	0.632969	S.D. dependent var	1.665187
S.E. of regression	1.008822	Akaike info criterion	3.020265
Sum squared resid	189.2962	Schwarz criterion	3.651987
Log likelihood	-302.3102	Hannan-Quinn criter.	3.275146
F-statistic	10.54820	Durbin-Watson stat	2.364841
Prob(F-statistic)	0.000000		

**Lampiran I****Uji Heteroskedastisitas**

Dependent Variable: RESABS

Method: Panel Least Squares

Date: 08/14/18 Time: 22:36

Sample: 2010 2015

Periods included: 6

Cross-sections included: 38

Total panel (balanced) observations: 228

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
X1	-0.186397	0.964227	-0.193312	0.8469
X2	-0.101394	0.053104	-1.909354	0.0577
X3	-0.250490	0.186343	-1.344245	0.1805
C	7.253878	12.10934	0.599032	0.5499

**Effects Specification**

Cross-section fixed (dummy variables)

R-squared	0.217307	Mean dependent var	0.715534
Adjusted R-squared	0.049886	S.D. dependent var	0.567509
S.E. of regression	0.553173	Akaike info criterion	1.815119
Sum squared resid	57.22203	Schwarz criterion	2.431800
Log likelihood	-165.9236	Hannan-Quinn criter.	2.063931
F-statistic	1.297969	Durbin-Watson stat	2.179992
Prob(F-statistic)	0.127480		